



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194
Website: www.pa-malangkab.go.id email: pa.kab.malang@gmail.com
KEPANJEN - MALANG 65163

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berikut kepada para keluarga, para sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022 ini dengan baik dan tepat waktu.

Tak lupa ucapan terimakasih kepada seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang turut serta membantu dalam proses penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022 sehingga dapat terselesaikan secara paripurna.

Kami menyadari bahwa dalam laporan ini tentu masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan dari semua pihak guna sempurnanya penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini bermanfaat bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang khususnya serta merupakan sarana evaluasi dalam menentukan kebijakan kedepan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dapat menjadi sarana pembelajaran maupun penelitian baik bagi para peneliti ataupun Mahasiswa yang tengah menyelesaikan studinya.

Kepanjen, 31 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang



Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19741002.199603.1.001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara dan	
Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	21
A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum /Agama /Miltun	21
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	21
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	21
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	21
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	
B. Penyelesaian Perkara	22
- Jumlah sisa perkara yang diputus	22
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	22
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding,	
Kasasi dan PK	24
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	25
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	25
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	25
- Sidang keliling / pelayanan terpadu	27
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)	27
BAB III Sumber Daya Manusia	
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan /golongan /pendidikan ..	29

- Mutasi	30
- Promosi	31
- Pensiun	31
- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)	31
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi Informasi	
A. Pengelolaan Keuangan	34
B. Pengelolaan Sarana dan Prasana	39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	47
- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan	47
Umum / Agama /Miltun	47
- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan	50
Umum /Agama /Miltun	50
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	
- Akreditasi Penjaminan Mutu	51
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	52
- Inovasi Pelayanan Publik	53
BAB VI Pengawasan	
A. Internal	61
B. Evaluasi	64
BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi	
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	69
C. Penutup.....	70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Data Jenis Perkara Yang Diterima Tahun 2022
Lampiran 2	: Data Jenis Perkara Yang Diputus Tahun 2022
Lampiran 3	: Data Jenis Perkara Tundaan Tahun 2022
Lampiran 4	: Data Perkara Yang Belum Diminutasi
Lampiran 5	: Putusan Yang Diajukan Banding
Lampiran 6	: Perkara Yang Diajukan Kasasi
Lampiran 7	: Perkara Yang Diajukan Peninjauan Kembali
Lampiran 8	: Rekapitulasi Laporan Mediasi Tahun 2022
Lampiran 9	: Rekapitulasi Layanan Posbakum 2022
Lampiran 10	: Statistik PNS
Lampiran 11	: Statistik Tenaga Honorer
Lampiran 12	: Mutasi Kenaikan Pangkat
Lampiran 13	: Mutasi kenaikan gaji berkala
Lampiran 14	: Daftar Mutasi Pegawai masuk
Lampiran 15	: Daftar Mutasi Pegawai keluar
Lampiran 16	: Daftar Cuti Pegawai
Lampiran 17	: Promosi Pegawai
Lampiran 18	: Daftar Pensiun Pegawai
Lampiran 19	: Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial
Lampiran 20	: Data Tenaga Teknik Yudisial
Lampiran 21	: Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial
Lampiran 22	: Data Tenaga Non Teknis
Lampiran 23	: Jumlah SDM
Lampiran 24	: Rincian Belanja Pegawai
Lampiran 25	: Rincian Belanja Barang
Lampiran 26	: Rincian Belanja Modal
Lampiran 27	: Rincian PNPB DIPA 01 Tahun 2022
Lampiran 28	: Rincian DIPA 04 Tahun 2022
Lampiran 29	: Rincian PNPB DIPA 04 Tahun 2022
Lampiran 30	: Matrik Barang Inventaris
Lampiran 31	: Data Surat Masuk Tahun 2022
Lampiran 32	: Data Surat Keluar Tahun 2022



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia mempunyai empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila sebagai pilar *pertama* yang merupakan falsafah hidup berbangsa dan bernegara, kemudian pilar *kedua* adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi dasar Negara Indonesia. Pilar *ketiga*, adalah NKRI, bahwa Republik Indonesia kuat karena Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan pilar *keempat* atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Empat pilar tersebut merupakan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara dalam masyarakat.

Pemisahan kekuasaan negara yang digunakan menganut konsep trias politika yang berarti ada tiga (3) tonggak kekuasaan yang sejajar dan beriringan dalam membangun NKRI yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

- a. Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.
- b. Legislatif adalah membuat undang-undang yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- c. Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang yaitu ditangani oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Kekuasaan Yudikatif atau yang kemudian jamak dikenal dengan Kekuasaan Kehakiman berkewajiban untuk mempertahankan Undang-undang (UU) dan berhak untuk memberikan Peradilan secara berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sejak era reformasi hingga sekarang terdapat banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan, baik kultur demokrasinya, sistem pemilu, maupun pembagian kekuasaan. Pada Kekuasaan Yudikatif, perubahan yang paling mendasar dalam sistem Peradilan adalah penyatuatapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI Reformasi di bidang Peradilan tersebut diawali pada Amandemen ke-3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945,

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi : *“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, dan pada ayat (2) berbunyi : *“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 dinyatakan bahwa, *“Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 berbunyi, *“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”*. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa *“Ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan Peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan Peradilan masing - masing”*. Sebagai realisasi dari pasal tersebut, khusus untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berlakunya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membuat tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut, tentu membawa konsekuensi logis terhadap

pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama kedepan baik dari sisi administratif, personil (SDM), finansial maupun sarana dan prasarana.

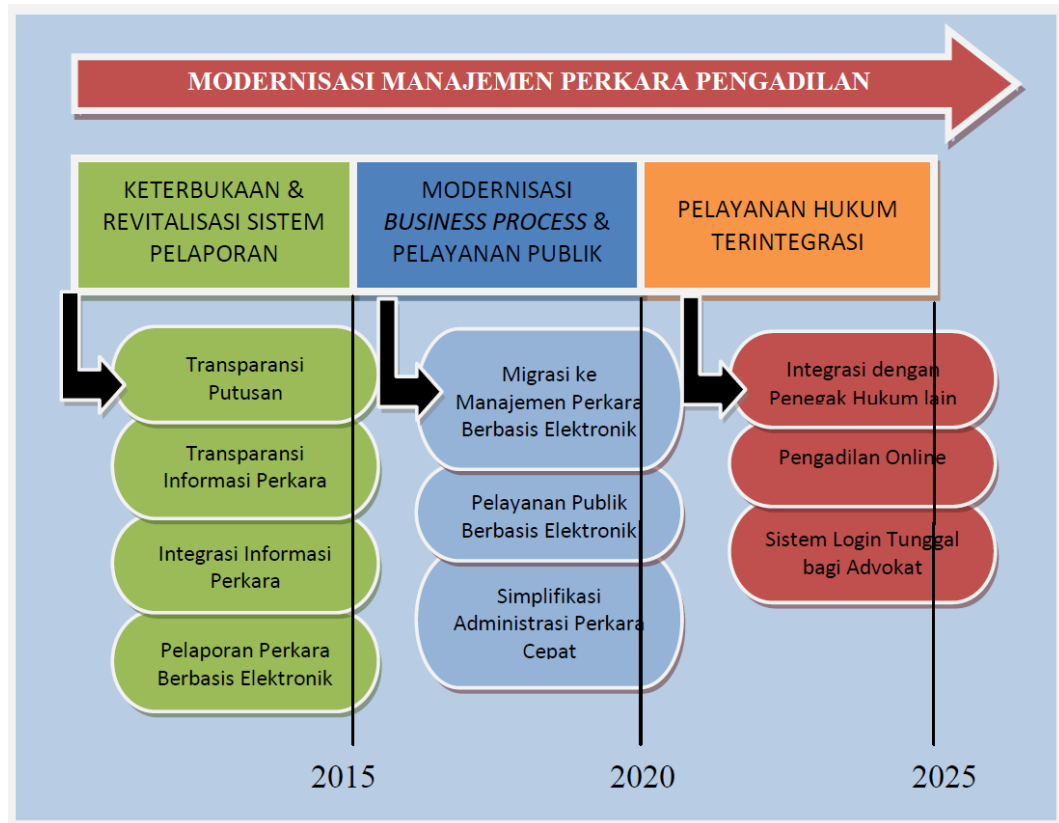
Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Hukum Kabupaten Malang. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Kabupaten Malang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Program dan kebijakan Mahkamah Agung tersebut dituangkan kedalam Cetak biru (Blue Print) dan Rencana Strategis Mahkamah Agung (Renstra) Tahun 2020-2024 yang merupakan tolak ukur Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, administrasi perkara, arah kebijakan strategis berikut rencana strategis dan pengelolaan anggaran APBN serta penyediaan sarana prasarana, inovasi-inovasi serta prestasi-prestasi yang dicapai dalam 1 (satu) tahun berjalan di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Ketua Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan lebih lanjut guna penyempurnaan di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran Peradilan lainnya serta masyarakat umum dan akademisi. Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2022 secara rinci akan terurai dalam bab-bab selanjutnya.

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pelayanan Hukum Terintegrasi adalah program prioritas Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 – 2035 untuk kurun waktu 5 tahun ketiga antara tahun 2022-2025.



Area tersebut menjadi penting dalam mencapai pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan mengingat setelah berhasil pada etape pertama dan kedua yakni fase Keterbukaan dan Revitalisasi Sistem Pelaporan dan fase Modernisasi Business Process dan Pelayanan Publik, maka Peradilan Agama terus melakukan pembaruan kearah yang telah ditetapkan Mahkamah Agung yakni menjadi Peradilan yang modern dan mampu memberikan Pelayanan Hukum terintegrasi kepada para pihak berperkara dengan mengintegrasikan layanan dengan Penegak Hukum lain, adanya Pengadilan online serta Sistem Login Tunggal bagi Advokat atau dikenal dengan Sistem SSO (Single Sign On) seiring telah terciptanya sebuah system Manajemen perkara berbasis elektronik (*e-court*), Ruang Sidang Elektronik dan Pelayanan Hukum Terpadu.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam upayanya menjadi *agent of change* (agen perubahan) telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam sistem Peradilan dengan meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (setara ISO 9001:2015) dengan cakupan 7 (tujuh) kriteria *Indonesian Court Performance (-) Excellent* (ICP-E) yakni Kepemimpinan, Perencanaan Strategis, Fokus Pelanggan, Sistem Dokumen, Manajemen Sumberdaya, Manajemen Proses dan Hasil Kinerja. Dalam mempertahankan sertifikasi Akreditasi ini, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula mendapatkan audit eksternal dari Komisi Akreditasi Nasional Badilag pada bulan November 2021 dan telah pula merampungkan hasil dari surveillance eksternal tersebut dengan membenahi beberapa dokumen kerja yang telah dibuat sebelumnya, dengan harapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan berhasil mempertahankan Akreditasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan penancangan pembangunan Zona Integritas dan bertindak sebagai pelopor instansi Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Malang bersama-sama dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepala Kepolisian Resort Kepanjen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Komandan Kodim 0818 Kabupaten Malang di Tahun 2018 yang lalu.

Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah WBK dan WBBM ini penting dilakukan mengingat didalamnya mengandung unsur-unsur penguat terhadap Akreditasi Penjaminan Mutu dalam upaya memperkuat reformasi birokrasi. Adanya proses transparansi yang selalu ditunggu - tunggu oleh masyarakat pencari keadilan juga menjadi kata kunci dalam pembangunan Zona Integritas tersebut. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat ditunaikan secara transparan oleh lembaga Peradilan dalam sinergi terhadap reformasi birokrasi sehingga dengan demikian para pencari keadilan dapat lebih mengetahui secara detail tentang perkembangan perkaranya, apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Tidak adanya transparansi, selalu menimbulkan adanya kecurigaan orang dan akan membawa konsekuensi kepada penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Oleh karena itu untuk memulihkan kepercayaan publik, transparansi Peradilan adalah suatu hal yang sudah seharusnya dilakukan, Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 1-144/KMA/SK/2011 Tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh badan publik, termasuk Pengadilan. Termasuk di dalamnya beberapa keputusan setingkat Dirjen yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama MARI Nomor : 0017/DJA/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan Agama.

Kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, khususnya Peradilan Agama semakin menguat dalam beberapa dekade namun upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 tentang Standart Pelayanan Peradilan harus terus berjalan. Berangkat dari ketentuan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menindaklanjuti dengan menerapkan *Standard Operational Prosedure (SOP)* sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/113/OT.01.3/SK/I/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang SOP dengan beberapa turunan pengganti untuk dijadikan acuan dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan yang menghendaki pembaharuan, prinsip akuntabilitas dan transparansi Peradilan guna mendukung indenpendensi Peradilan, yang esensinya adalah memberikan hak bagi publik untuk mengakses informasi yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Karena itu dengan adanya keterbukaan, maka aparatur Pengadilan akan menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan tupoksinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus berupaya melakukan terobosan guna menciptakan pelayanan yang lebih mudah, efektif dan efisien serta terjangkau kepada seluruh masyarakat pencari keadilan. Terobosan dimaksud dapat melalui inovasi-inovasi terbaru untuk mempermudah pelayanan para pihak berperkara, dapat berupa perubahan roleplay / SOP di bidang pelayanan publik sehingga tercipta layanan yang cepat dan tepat sasaran maupun dengan melakukan kerjasama lintas sektoral. Ketua PA Kab. Malang mengadakan perjanjian kerjasama lintas sektoral dengan 4 (empat) instansi secara sekaligus, yakni Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LP3M UB). Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) untuk mewujudkan Pengadilan yang inklusi. Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang dalam hal akses pertukaran informasi data secara valid terhadap pihak- pihak berperkara. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang untuk saling bersinergi dalam memberikan layanan pojok konseling.

Ketua PA Kab. Malang – Dr. H. Suhartono, S.Ag. S.H. M.H. telah berkomitmen dan mendeklarasikan diri bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan Pengadilan Inklusif yaitu dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan gencarnya pembangunan sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan diraihnya penghargaan pada bulan Februari 2021 dari Kemenpan RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sebagai Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020.



Gambar 1. Piagam Penghargaan Role Model dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus Tahun 2020 dari Kemenpan RB

Selain itu, layanan disabilitas yang gencar dibangun di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut diresmikan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama – Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag - Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya - Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H., Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya – H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H. bersama tim dari Ditjen Badilag dan PTA Surabaya.



Gambar 2. kika, Sekretaris PTA Surabaya, Panitera PTA Surabaya, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, Direktur Jenderal Badilag, Ketua PTA Surabaya, Ketua PA Kab Malang dan Wakil Ketua PA Kab. Malang saat peresmian Layanan Disabilitas di PA Kab. Malang.

Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan kabar gembira dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2022, PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA. Penghargaan tersebut ditayangkan pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian PANRB.



Gambar 3. PA Kab. Malang berhasil meraih predikat Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori PELAYANAN PRIMA

Paradigma pembinaan yang dikembangkan di masa era reformasi sekarang ini mutlak harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan teknologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Hal itu sudah sejalan dengan Perma nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Perkembangan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selama tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pelayanan prima dan keterbukaan informasi kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara :

1. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar sesuai SOP terutama pada area-area pelayanan di mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan DIPA TA 2022 untuk pengadaan alat pengolah data sebesar Rp 226.000.000,- (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) untuk PC Kepaniteraan sejumlah 16 buah dan printer sebanyak 2 buah;
2. Memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan yang berada di luar Kabupaten Malang dengan Ruang Sidang Elektronik dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan DIPA TA 2022 untuk sidang keliling sebesar Rp. 41.800.000,- (empat puluh satu delapan ratus ribu rupiah);
3. Mendukung kinerja kesekretariatan dimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan tambahan anggaran DIPA TA 2022 sebesar Rp. 199.400.000 (seratus sembilan puluh sembilan empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan fasilitas perkantoran;
4. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar sesuai SOP terutama pada area-area pelayanan publik baik Posbakum, Mediasi, ruang PTSP dan ruang Sidang;
5. Menempelkan pengumuman tentang Jadwal Antrian Sidang (Maskarebet) baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada website resmi Pengadilan;
6. Menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara baik di ruang tunggu pengunjung maupun pada website resmi Pengadilan;
7. Melarang aparat Peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Melakukan sosialisasi pendaftaran Perkara melalui E-Court Mahkamah Agung RI bagi Pengguna terdaftar lainnya setelah ditahun sebelumnya berhasil mensosialisasikan Pengguna Terdaftar (Advokat) agar berperkara melalui e-Court;

9. Dengan penyempurnaan terhadap perangkat kerja dan personil yang berada di area pelayanan publik PTSP serta membuat role play tentang disiplin dan tupoksi sehingga pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kab. Malang bisa meraih predikat Pelayanan Prima dari Kemenpan RB;
10. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi melalui website resmi Pengadilan dengan beberapa layanan yang efisien dan efektif seperti Telescop, Jadwal Sidang Maskarebet, Survey Online, Informasi Perkara serta tautan-tautan layanan Peradilan dan informasi Hukum yang memadai untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya;
11. Arema Plus, yakni Inovasi terkini yang dapat mengakses ruang tunggu secara mandiri dan aman dengan kartu Arema yang telah diberikan saat pendaftaran perkara;
12. Maskarebet, antrian sidang secara otomatis tanpa ribet yang terpublish pada website Pengadilan dan terpampang pada papan pengumuman;
13. Antrian PTSP, dengan media informasi perkara melalui TV Media yang tersedia di ruang tunggu PTSP;
14. Informasi perkara lainnya seperti bentangan poster, pamflet dan brosur;
15. Informasi perkara otomatis melalui SMS gateway dengan aplikasi SPS (system pengingat sidang) dan layanan lainnya seperti pengambilan Akta Cerai, pengambilan salinan putusan dll termasuk didalamnya Whatsapp dan Arema Plus Mobile untuk aplikasi smartphone;
16. Aplikasi ATR (Audio text to Recording), sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas proses persidangan, yang mampu merekam seluruh pembicaraan yang ada dalam persidangan langsung dalam bentuk teks, dan dalam update terakhir, ATR telah mampu merekam gambar bergerak para pihak dan Hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam format suara (*.webm) demi menjamin keterbukaan dan validitas data persidangan;
17. Adanya kotak saran sebagai upaya perbaikan yang komprehensif ataupun melalui online dengan cara mengirim pesan secara langsung kepada Petugas Meja Informasi;

18. Meja Informasi Online yang bisa diakses oleh para pihak berperkara untuk mengirim pesan kepada petugas meja informasi yang tersedia di website;
19. Sarana dan prasarana disabilitas yang dibangun di lingkungan kantor PA Kab. Malang untuk mempermudah para pihak berperkara penyandang disabilitas dalam berperkara;
20. Akurasi dan ketepatan waktu pelaksanaan Anggaran DIPA sehingga didapat output dan outcome secara maksimal sesuai ABK (Anggaran Berbasis Kinerja).

Di samping hal-hal yang telah diupayakan di atas, dalam hal pelayanan publik dan persidangan, Pengadilan telah memiliki 2 (dua) SOP (Standar Operasional Prosedur) serta pemberlakuan Sistem Antrian (*Queuing System*), meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (*Justice for all*) dengan telah menjalankan tiga Program Utama yang masuk dalam Prolegnas yaitu :

1. Pembebasan biaya perkara (Fasilitas Prodeo DIPA maupun Non DIPA)
2. Penyediaan Pos Bantuan Hukum,
3. Sidang Keliling turun ke daerah atau wilayah yang sulit dijangkau atau marjinal di Kabupaten Malang.

Menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung RI, sampai akhir tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanfaatkan dan menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 5.1.0.

Di samping itu, agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi berjalan dengan efektif, telah ditunjuk petugas khusus sebagai pengelola yang bertugas mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, termasuk dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan operator. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A35/5400/HM.02.3/SK/9/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Susunan Tim Pengelola dan Inovasi Teknologi Informasi (TI) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan etos kerja, maka kedisiplinan merupakan bagian yang harus ditingkatkan bukan karena tunjangan yang tinggi namun suatu kewajiban bahwa Pegawai harus memiliki tanggung jawab. Sebagai dasar pelaksanaan, maka Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: W13-A35/5490/PS.01/SK/9/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”***.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan;

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Menerapkan manajemen Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang modern;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai-nilai yang menjadi motto Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni :

- a. **P**rofesional.
- b. **A**kuntabilitas.
- c. **S**antun.
- d. **T**ransparan.

- e. **I**novatif.
- f. **B**ermartabat
- g. **I**ntegritas.
- h. **S**emangat.
- i. **A**manah.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun. Bahwa program pembangunan lembaga Peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut berada dalam 7 (tujuh) area yakni :

1. Area organisasi dan kepemimpinan.
Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan management Pengadilan yang responsif.
2. Area kebijakan.
Adanya kebijakan-kebijakan Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.
3. Area proses berperkara.
Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur.
Adanya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.
5. Area kepuasan pencari keadilan.
Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna Pengadilan
6. Area keterjangkauan.
Tersedianya pelayanan Pengadilan yang terjangkau.
7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan.

Adapun program Prioritas Pembaruan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

1. Penyelesaian perkara
2. Manajemen SDM
3. Pelayanan Publik
4. Pelayanan Meja Informasi
5. Pengawasan / Pengaduan
6. Pengelolaan website
7. Penguatan SIPP dan
8. "Justice for all" yang terdiri dari perkara prodeo, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Di samping itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang melaksanakan 8 (delapan) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2. Penataan Peraturan PerUndang - undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (Berbasis IT)
6. Penguatan Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta Perilaku Hakim, berpedoman pada kode etik dan perilaku Hakim. Berdasarkan Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SK/IV/2009, - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditunjang dengan aturan terbaru yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya maka Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim di Implementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1. Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku arif dan bijaksana
4. Bersikap mandiri
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggung jawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku rendah hati
10. Bersikap profesional

C. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 (empat) rencana strategis yang tertuang pada RENSTRA Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni:

1. Mewujudkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan akuntabel.
2. Mewujudkan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel (implementasi SIPP secara menyeluruh baik local maupun website ataupun yang berbasis *web server*).
3. Mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih merata dan terjangkau di semua wilayah yurisdiksi Pengadilan.
4. Mewujudkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (riil eksekutable).

Selain rencana strategis tersebut di atas guna mewujudkan visi dan misi Pengadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyiapkan langkah-langkah strategis lainnya yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia***, yaitu dengan mengikutsertakan seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengikuti seminar, sosialisasi, pelatihan, pendidikan dan lain-lain, sehingga

dapat meningkatkan kinerja aparat Peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan;

2. ***Membangun Budaya Kerja Profesional***, yaitu dengan menghilangkan kesan Pintar Goblok Penghasilan Sama (PGPS). Adapun cara menghilangkan kesan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menegakkan kedisiplinan dengan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juncto Perma Nomor 7 Tahun 2019 serta mengacu kepada SOP (Standart Operasional Procedur) dan Standart Pelayanan Peradilan, begitu juga Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan menindak aparatnya yang dinilai dan terbukti melanggar kedisiplinan dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang Kepegawaian. Sedang kepada aparat yang berprestasi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang akan memberikan penghargaan (*Reward*), hal ini untuk memacu aparat yang lain berlomba-lomba berprestasi.
3. ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***, yaitu meningkatkan akses publik melalui website yang di miliki Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai status perkara, mengenai biaya perkara, alur perkara, jadwal sidang, salinan putusan, juga yang berkaitan dengan organisasi Pengadilan, standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi lebih mudah dan murah. Di samping itu pula adanya *live chat* atau pesan singkat secara *online* telah pula diterapkan dalam *website* resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjangkau pertanyaan-pertanyaan singkat oleh masyarakat pencari keadilan secara cepat dan mudah, Hal ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aparatur Pengadilan ataupun masyarakat yang nakal menjadi ”calo perkara”.
4. ***Menjaga Kemandirian Badan Peradilan***, yaitu Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian

individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang diembannya. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan Pengadilan. Tujuan penyelenggaraan Pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

5. ***Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan***, yaitu tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif

sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

6. ***Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan***, yaitu kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya - upaya tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

7. ***Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan***, yaitu Kredibilitas dan Transparansi badan Peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan Peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Badan Peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.



BAB II

**KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)**

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

A. KEADAAN PERKARA

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perkara. Pada tahun 2022 menerima perkara sejumlah 9.569 (sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara. Sehingga total perkara yang ditangani sejumlah 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) perkara. Dari total perkara tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 telah memutuskan 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara, sehingga sisa perkara pada tahun ini sejumlah 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara.

- Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 4 (lima) perkara. Pada tahun 2022 telah menerima permohonan upaya hukum banding sejumlah 36 (dua puluh empat) perkara dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sejumlah 29 (dua puluh sembilan) perkara sehingga terdapat sisa 11 (sebelas) perkara dengan rincian 3 (tiga) perkara telah terkirim dan 8 (delapan) perkara masih dalam proses.

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sejumlah 3 (tiga) perkara. Pada tahun 2022 telah menerima permohonan upaya hukum kasasi sejumlah 10 (sepuluh) perkara dan telah diputus oleh Mahkamah Agung sejumlah 5 (lima) perkara sehingga terdapat sisa 8 (delapan) perkara, dengan rincian 7 (tujuh) perkara terkirim dan 1 (satu) perkara masih dalam proses, dan telah menerima permohonan upaya hukum Peninjauan

Kembali sejumlah 1 (satu) perkara pada tahun ini.

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah sisa perkara yang diputus

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 memiliki sisa perkara yang belum selesai sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) perkara dan perkara permohonan sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara. Dari jumlah sisa tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 dapat menyelesaikan 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perkara dan telah terselesaikan pada tahun ini, sedangkan sisa perkara yang diajukan banding tahun 2021 dan belum diputus pada tahun 2022 sebanyak 0 (nol) perkara, sisa perkara yang diajukan kasasi tahun 2021 dan belum diputus hingga tahun 2022 sebanyak 0 (nol) perkara serta sisa perkara yang dimohonkan PK tahun 2021 dan belum diputus hingga tahun 2022 sebanyak 0 (nol) perkara.

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 mempunyai sisa perkara yang belum selesai sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perkara terdiri dari perkara gugatan sebanyak 827 (delapan ratus dua puluh tujuh) perkara dan perkara permohonan sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara, sedang pada tahun 2022 menerima perkara sebanyak 9.569 (sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara yang terdiri dari 7.506 (tujuh ribu lima ratus enam) perkara gugatan dan 2.063 (dua ribu enam puluh tiga) perkara permohonan. Total keseluruhan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) yang perkara terdiri dari 8.333 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) perkara gugatan dan 2.099 (dua ribu sembilan puluh sembilan) perkara permohonan. Pada tahun 2022, perkara yang diterima mengalami peningkatan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara (1,00%) (satu koma nol nol persen) apabila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2021 yang diterima sebanyak 9.545 (sembilan ribu lima ratus empat puluh lima) perkara.

Adapun perkara yang diputus pada tahun 2022 sebanyak 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara dari 10.432 perkara atau (91,75%) (sembilan puluh satu koma tujuh puluh lima persen) yang terdiri dari 7.517 (tujuh ribu lima ratus tujuh belas) perkara gugatan dan 2.054 (dua ribu lima puluh empat) permohonan sebagaimana matrik terlampir, sehingga sisa tundaan perkara yang belum diputus sebanyak 861 (delapan ratus enam puluh satu) perkara (8,25%) (delapan koma dua puluh lima persen) terdiri dari 816 (delapan ratus enam belas) perkara gugatan dan 45 (empat puluh lima) perkara permohonan, dengan demikian penyelesaian perkara pada tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen).

Dari jumlah sisa perkara tahun 2021 ditambah perkara yang diterima pada tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menangani perkara sebanyak 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) dan telah memutus sebanyak 9.292 (sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) perkara tepat waktu serta 33 (tiga puluh tiga) perkara tidak tepat waktu (diputus lebih dari 5 bulan) karena salah satu pihak ghoib, PNS dan anggota TNI/POLRI, sehingga jumlah seluruhnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebanyak 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara.

Rincian jenis perkara yang diterima pada tahun 2022 terbaca pada **Lampiran 1**, rincian jenis perkara yang diputus pada tahun 2022 dapat dilihat pada dalam **Lampiran 2**, sedang sisa perkara tundaan menurut jenisnya ada pada **Lampiran 3**.

Adapun perkara putus tahun 2022 sebanyak 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara dan yang telah diminutasi sebanyak 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara (100%), sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sebanyak 0 (nol) perkara (0%), sebagaimana (**Lampiran 4**) dan matrik terlampir.

Lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



- **Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara dan dari jumlah perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara, dan 1 (satu) perkara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sedangkan yang **tidak mengajukan upaya hukum banding 9.534 (sembilan ribu lima ratus tiga puluh empat) perkara (99,6%)**, sedangkan dari 36 (tiga puluh enam) perkara yang mengajukan banding tersebut, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 10 (sepuluh) perkara dan **yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 26 perkara (72,2%)**, kemudian dari jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebanyak 10 perkara tersebut, **yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 (nol) perkara (100%)**. Sebagaimana (*Lampiran 5, 6 dan 7*).

- **Jumlah Perkara yang berhasil di mediasi**

Dari jumlah sisa perkara tahun 2021 sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perkara ditambah dengan penerimaan perkara pada tahun 2022 sebanyak 9.569 (sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara, jumlah perkara yang melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) perkara (8,6%) dan yang **berhasil dimediasi sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) perkara (15,8%)**, sedangkan perkara yang gagal dimediasi dan tidak layak mediasi sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) perkara (6%), perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 9.666 (sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) perkara (92,65%) sebagaimana (*Lampiran 8*).

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- **Posbakum**

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu fasilitas yang disediakan untuk membantu para pihak dalam membuat surat gugatan atau permohonan. Dalam membuat surat gugatan atau permohonan tersebut para pihak tidak dipungut biaya sedikitpun (gratis).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan fasilitas layanan posbakum, bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yaitu Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan Perjanjian Kerjasama (MoU) Nomor W13-A35/114/PL.01/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 untuk pelaksanaan Anggaran Posbakum DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terserap sebesar Rp99.974.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) jam layanan dan 7.609 (tujuh ribu enam ratus sembilan) pemohon bantuan hukum sebagaimana Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) Nomor : W13-A35/8125/PL.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Lembaga bantuan hukum ini sesuai perjanjian kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan layanan sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan seperti surat permohonan dan gugatan dalam perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- d. Bantuan sebagai pendamping atau kuasa khusus bagi salah satu pihak pencari keadilan dalam beracara dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Jam Layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah pada jam kerja yaitu pada hari Senin s.d Jum'at, mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB atau sampai Pemohon bantuan hukum pada hari itu terlayani semua meskipun jam pelayanan Posbakum sudah selesai.

Jika ditilik dari jam layanan, maka Layanan Posbakum ini telah melebihi pagu anggaran yang ditetapkan yakni 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) jam layanan dengan hasil dilapangan sebesar 1.351 (seribu tiga ratus lima puluh satu) jam (lebih 122 jam) dengan jumlah perkara sebanyak 7.609 (tujuh ribu enam ratus sembilan) perkara. Hal ini karena telah adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan LKPH Universitas Muhammadiyah Malang sebagai Pelaksana Posbakum dalam melayani masyarakat tidak mampu yang beracara di Pengadilan agar tetap melayani pemberian

bantuan hukum/advis kepada para pihak hingga masa perjanjian berakhir.

Rekapitulasi jumlah layanan Posbakum selama tahun 2022 dapat dilihat pada (**Lampiran 9**) dengan grafik tertampil di bawah ini :



- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan anggaran dalam DIPA 2022 untuk pelaksanaan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu sebesar Rp41.800.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kantor Pengadilan sehingga keberadaan Sidang Keliling tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan.

- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Jumlah Perkara Prodeo DIPA yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 mendapatkan anggaran dari

DIPA Dirjen Badilag sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Jumlah perkara prodeo DIPA sejumlah 97 (sembilan puluh tujuh) perkara dan kesemuanya telah diselesaikan dengan baik dengan sisa anggaran Rp0,00 (nol rupiah).



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem yang baik yang telah tercipta pada sebuah organisasi tidak akan berjalan baik apabila sumber daya manusianya tidak peduli dengan organisasi itu sendiri. Kedudukan dan peranan sumber daya manusia pada sebuah organisasi manapun amatlah penting dan menentukan, karena setiap SDM merupakan roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh organisasi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna, produktif dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda organisasi dimaksud. Oleh karena itu membina dan mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing menjadi sebuah keharusan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI selain mempunyai tugas pokok dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya di bidang yudisial telah mengambil langkah konkrit yakni :

- a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum;
- b. Mengikutkan Diklat dan/atau pelatihan yang diadakan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung RI terhadap SDM baik Teknis maupun Non Teknis;
- c. Mengadakan rapat dinas secara berkala dalam rangka pembinaan seluruh pegawai;
- d. Mengadakan rapat dinas struktural secara berkala demi peningkatan mutu Pengadilan;
- e. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan;
- f. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai untuk memutuskan memberikan promosi dan mutasi.
- h. Memberikan standar yang jelas dalam penyelesaian tugas-tugas di bidang organisasi dan tata laksana tak terkecuali mengenai pensiun pegawai/Hakim sehingga tercipta kepastian hukum bagi yang bersangkutan.

Adapun secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 berjumlah 51 (lima puluh satu) orang Hakim dan PNS serta dibantu oleh 20 (dua puluh) PPNP yang digaji oleh DIPA tahun anggaran 2022 seperti dijabarkan pada **Lampiran 10** (Statistik PNS) dan **Lampiran 11** (Statistik Tenaga PPNP).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal rekrutmen tidak mempunyai kewenangan, karena dalam hal ini rekrutmen menjadi wewenang / hak Mahkamah Agung RI.

1. Mutasi

Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian mutasi kenaikan pangkat, mutasi gaji berkala, mutasi jabatan intern, mutasi tempat tugas.

- a. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 6 (enam) pegawai, dan telah terealisasi 6 (enam) orang sebagaimana dalam **Lampiran 12**.
- b. Mutasi kenaikan gaji berkala sebanyak 26 (dua puluh enam) hakim dan pegawai, dan telah terealisasi semua sebagaimana dalam **Lampiran 13**.
- c. Mutasi tempat tugas adalah pegawai yang dimutasi keluar atau masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk tahun 2022 terdapat 2 (dua) hakim dan 3 (tiga) orang pegawai mutasi masuk sebagaimana dalam **Lampiran 14** dan terdapat 8 (delapan) hakim dan 3 (tiga) orang pegawai mutasi keluar sebagaimana dalam **Lampiran 15**.
- d. Cuti, sebagaimana peraturan pegawai bahwa setiap pegawai Negeri Sipil mempunyai hak cuti yang meliputi: cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti karena alasan penting, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2022 Hakim dan Pegawai yang mengajukan cuti sebanyak 51 orang, sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 16**.

2. Promosi

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 7 (tujuh) orang hakim dan pegawai promosi jabatan dalam **Lampiran 17**.

3. Pensiun

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 4 (empat) orang pegawai dan hakim yang pensiun dan sudah turun SK pensiunnya yaitu an.

1) H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S. 2) H. Mubahi, S.H. 3) Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H., sebagaimana terlampir dalam **Lampiran 18**.

4. Diklat

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Upaya peningkatan SDM Teknis Yudisial sangat penting untuk dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena baik Hakim dan Panitera merupakan tolak ukur dalam terselenggaranya penegakan hukum dan terwujudnya rasa keadilan yang sesungguhnya di masyarakat. Dengan demikian, profesionalitas aparatur Teknis Yudisial menjadi keniscayaan. Peningkatan sumber daya manusia dengan meningkatkan nurani (*morals*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) aparat pengadilan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur serta pengalaman kerja melalui mutasi terencana (baca : **Lampiran 19 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga teknis yudisial**).

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai Tunjangan Pejabat Negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Di bawahnya, maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung pada umumnya, dan Pengadilan Agama khususnya lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan wajah Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid. Perjalanan agenda reformasi masih panjang, komitmen dan kerja keras serta kesediaan berubah adalah kunci sukses implementasinya.

Adapun SDM Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdiri dari Hakim sebanyak 15 orang (Ketua, Wakil Ketua dan 13 hakim), Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang, Panitera Pengganti 14 orang, sedang Jurusita sebanyak 1 orang dan Jurusita Pengganti sebanyak 2 orang. (sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 20**). Adapun staf yang membantu administrasi di Kepaniteraan yaitu tenaga kontrak sebanyak 10 orang.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial di sini adalah aparatur peradilan yang mengelola bidang organisasi dan tata laksana serta administrasi umum, sering di istilahkan dengan sebutan Sekretariat, dimana lingkup Sekretariat ini lebih luas dan bersifat umum. Sekretariat memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya *ke dalam* (mengenai tata kelola kepegawaian, keuangan atau gaji pegawai dan pengelolaan sarana prasarana untuk pegawai) dan juga *keluar* yang menyangkut pelayanan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kebersihan kantor.

Guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan serta Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), metting dan pengkajian. (baca: **Lampiran 21 tentang Pelatihan/diklat untuk tenaga non teknis yudisial**)

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tenaga Non Teknis Yudisial terdiri dari Sekretaris 1 orang, Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Subbag. Umum dan Keuangan dan Kepala Subbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masing-masing sebanyak 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 (satu) orang merangkap Panitera Pengganti,

Kepala Subbag. Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana 1 (satu) orang dan sebagai Bendahara Penerimaan / PNBPN merangkap Panitera Pengganti 1 (satu) orang dan staf Umum dan Keuangan sebanyak 12 orang (2 dari PNS dan 10 dari tenaga kontrak) termasuk petugas keamanan dan cleaning service, sedang Pegawai dari Kepegawaian dan Ortala terdiri dari 1 Analis Kepegawaian ahli Pertama dan 1 orang PPNPN sedangkan dari Perencanaan, IT dan Pelaporan sebanyak 2 orang pegawai terdiri dari 1 orang Pranata Komputer dan 1 orang CPNS dan 1 orang tenaga kontrak (baca: ***Lampiran 22 tenaga non teknis***).

Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (Panitera dan Jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan,.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Upaya untuk menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara telah dirintis sejak awal berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian Undang-undang tentang Keuangan Negara merupakan kelanjutan dan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, penerapan kaidah-kaidah yang baik antara lain :

- akuntabilitas berorientasi pada hasil;
- profesionalitas;
- proporsionalitas;
- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan

pelaksana teknis serta secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum, Pejabat Penandatangan SPM / Penguji SPP yang dijabat oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, serta dibantu oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dan beberapa operator. Semua Pejabat Pengelola Keuangan tersebut juga sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)

Pengelolaan Keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan badan pada akun standart, namun yang digunakan dalam DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dengan Nomor : DIPA-005.01.2.604730/2022 tanggal 17 November 2021 ada 3 tiga jenis belanja yakni :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang termasuk kelompok belanja pegawai adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

- Pagu Anggaran

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 11.709.386.000,- (sebelas milyar tujuh ratus Sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu

rupiah)

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 11.624.256.695,- (sebelas milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enamratus Sembilan puluh lima rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar 99.27% .

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap, maka dari total anggaran tersebut belanja pegawai sisa sebesar Rp. 85.129.305,- (delapan puluh lima juta seratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) Matrik terlampir pada (*Lampiran 24*).

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu berupa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada Pengadilan terdiri dari belanja barang Operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja pemeliharaan.

- **Pagu Anggaran**

Pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk belanja barang non operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk tahun 2022 mendapatkan pagu sebesar Rp 0,- (nol rupiah) sedangkan untuk belanja operasional Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan Pagu sebesar Rp. 2.792.794.000,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

- **Realisasi Anggaran**

Belanja Barang Operasional dengan Pagu sebesar Rp. 2.791.444.161,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) pada tahun anggaran

2022 telah terealisasi sesuai dengan SPM/SP2D yang telah diterbitkan sebesar 2.791.444.161,- (dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah) sebesar 99,95% Matrik terlampir pada (*Lampiran 25*).

- **Sisa Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima untuk belanja barang non operasional ada sisa dana sebesar Rp 0,- (nol rupiah) sedangkan untuk belanja barang operasional berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi masih ada sisa dana sebesar Rp 1.349.839,- (satu juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) sisa anggaran tersebut ada pada kebutuhan sehari –hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan konsultasi.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan maksimal kapitalisasi aset tetap atau aset yang ditetapkan pemerintah.

- **Pagu Anggaran**

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama memperoleh belanja modal sebesar Rp. 425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) berupa pengadaan PC Kepaniteraan, Printer, AC Split, AC Standing, Camera Mirrorless, Stabilizer Camera, Printer, Meteran Digital, Barrier Gate.

Realisasi Anggaran

Realisasi sebesar Rp. 424.655.000,- (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan PC Kepaniteraan telah terealisasi/terserap sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) untuk pengadaan Printer sebesar Rp. 9.955.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk pengadaan AC Split sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh

tujuh juta rupiah), dan untuk pengadaan AC Standing sebesar Rp. 59.810.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk pengadaan Camera Mirrorless sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). dan untuk pengadaan Stabilizer Camera sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). dan untuk pengadaan Printer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). dan untuk pengadaan Meteran Digital sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). dan untuk pengadaan Barrier Gate sebesar Rp. 31.840.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Sisa Anggaran

Berdasarkan realisasi anggaran belanja modal berupa PC Kepaniteraan, Printer, AC Split, AC Standing, Camera Mirrorless, Stabilizer Camera, Printer, Meteran Digital, Barrier Gate. ada sisa sebesar Rp 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 99,82 %. Matrik terlampir pada (*Lampiran 26*).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2022 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) untuk Dipa 01. Matrik terlampir pada (*Lampiran 27*).

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 04 Badan Peradilan Agama (Badilag)

Dipa ini berasal Badan Peradilan Agama (Dipa 04) dengan Nomor : DIPA-005.04.2.604731/2022 tanggal 17 November 2021, membagi 3 jenis pelaksanaan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Pagu Anggaran

Pagu sebesar Rp. 241.920.000,- (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- 1). Percepatan Penyelesaian Perkara Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara;
- 2). Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (POSBAKUM);
- 3). Pembebasan Biaya Perkara;

4). Sidang Diluar Gedung Pengadilan.

b. Realisasi Anggaran

Dari pagu sebesar Rp. 241.920.000,- (dua ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) telah terserap / terealisasi sebesar 241.437.500,- (dua ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,80 % sehingga semua belanja barang terserap dengan baik.

c. Sisa Anggaran

Berdasarkan realisasi belanja barang hanya terdapat sisa sebesar Rp 482.500,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) karena volume perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tinggi sehingga membutuhkan belanja barang yang besar untuk dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan terutama untuk kegiatan sidang keliling yang belum bisa dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupetan Malang. Matrik terlampir pada *(Lampiran 28)*.

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2022 sebesar Rp. 856.308.500,- (delapan ratus lima puluh enam tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Dipa 04. Matrik terlampir pada *(Lampiran 29)*.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya.

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor

yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan Prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen dan rumah negara permanen.

Adapun pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi:

- Pelaksanaan OFBI tanah, bangunan kantor permanen dan rumah Negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang .
- Pengadministrasian tanah, bangunan kantor permanen dan rumah negara ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) bangunan kantor permanen sebanyak 2 KIB, yakni KIB Bangunan gedung kantor lama yang sekarang telah di alih fungsikan sebagai Gedung Arsip dan Mess, dan KIB Bangunan gedung kantor baru yang telah ditempati serta 4 KIB tanah negara.
- Melaksanakan revaluasi terhadap bangunan gedung dan tanah, dan telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.

Sedangkan pengelolaan tanah, bangunan kantor permanen di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi :

Gedung lama :

Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang lama, terletak di Jl. Panji No.202 Penarukan Kepanjen Kabupaten Malang, dibangun di atas tanah seluas 4.000 (empat ribu) M², di mana luas tanah untuk bangunan 845 (delapan ratus lima puluh lima) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 3.155 (tiga ribu seratus lima puluh lima) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) ruangan termasuk didalamnya 3 (tiga) ruang sidang dan sekarang dialifungsikan pemanfaatannya menjadi Gedung Arsip sesuai Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi nomor: 209/BUA/SK/10/2017.

Gedung baru :

Gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang baru, terletak di Jl. Raya Mojosari Kepanjen Kabupaten Malang, luas tanah seluas 6.423 (enam ribu empat ratus dua puluh tiga) M², di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.800 (seribu delapan ratus) M² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman dan tempat parkir) adalah 4.443 (empat ribu empat ratus empat puluh tiga) M². Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut merupakan gedung permanent berlantai 2 (dua) yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) ruangan termasuk didalamnya 1 (satu) ruang sidang utama dan 3 (tiga) ruang sidang biasa.

a. Pengadaan

untuk Tahun Anggaran 2022 tidak ada pagu untuk pengadaan gedung dan bangunan.

b. Pemeliharaan

Dalam Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Pagu Belanja biaya Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya sebesar Rp. 510,675,000 (lima ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 510,665,800 (lima ratus

sepuluh juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah) (100%), Hal ini digunakan untuk pengecatan gedung dan perbaikan-perbaikan lainnya / termasuk kamar mandi.

c. Penghapusan

Dalam Tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terdapat pengajuan penghapusan tanah, gedung dan bangunan.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang milik negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan.

Pengelolaan peralatan inventaris kantor di Pengadilan Agama Kabupaten Malang antara lain meliputi :

- Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan untuk Semester I, dan Semester II Tahun 2022 ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2022, dan juga telah di laporkan ke kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang Malang.
- Pembuatan DIR (Daftar Inventaris Ruangan) sebanyak 46 (empat puluh enam) ruangan.
- Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas bermotor roda 2 sebanyak 9 (sembilan) unit dan untuk kendaraan roda empat sebanyak 4 (empat) unit.
- Pelabelan nomor inventaris peralatan kantor.

Adapun barang jenis barang inventaris Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana Matrik terlampir pada **Lampiran 30**.

Di samping pengelolaan inventaris berupa Tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin juga terdapat pengelolaan aset lainnya/bahan-bahan pustaka di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, meliputi :

Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang kegiatannya meliputi :

- Untuk bahan pustaka yang baru diterima dengan membubuhi stempel instansi pada halaman judul, halaman terakhir, dan halaman rahasia, serta membubuhi stempel inventarisasi pada halaman balik judul dibagian yang tidak ada tulisan atau gambar.
- Membuat kartu buku dan kantong buku serta menempelkannya pada setiap buku baru.
- Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, memberi label dan menata bahan pustaka kedalam rak perpustakaan serta di masukkan pada aplikasi SLIMS (*Senayan Library Management Sytem*) dimana ke depan bisa di akses ke Website Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- Melayani para peminjam buku.

a. Pengadaan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mendapatkan dana untuk Pengadaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 425.400.000 (empat ratus dua puluh lima empat ratus ribu)

Pengadaan Alat Pengolah Data

- PC kepaniteraan sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) (100%)
- Printer sebesar Rp. 10.000.000,- (dua sepuluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 9.955.000,- (sembiliah juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) (99.55%),

Pengadaan Fasilitas Perkantoran

- AC Split sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) (100%)
- AC Standing sebesar Rp. 59.810.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 59.810.000,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) (100%)
- Camera Mirrorless sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (100%)
- Stabilizier Camera sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (100%)
- Printer sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) (100%)
- Meteran Digital sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (100%)
- Barrier Gate sebesar Rp. 31.840.000,- (tiga puluh satu juga delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 31.840.000,- (tiga puluh satu juga delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (100%)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 424.655.000, (empat ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) (99,82)% sisa anggaran sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

b. Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pada Tahun anggaran 2022 ini Pengadilan Agama Kabupaten Malang

mendapatkan dana dari DIPA untuk biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 229.815.000 ,:- (dua ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) yaitu berupa :

- Kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 10.285.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- BBM Mobil Sewa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- Server sebesar Rp. 24.405.000,- (dua puluh empat juta empat ratus lima ribu rupiah)
- Perawatan PC sebesar Rp. 22.111.000,- (dua puluh dua juta seratus sebelas ribu rupiah)
- Perawatan Laptop/Notebook sebesar Rp. 3.556.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
- Perawatan Printer sebesar Rp. 8.288.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Genset sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- AC Split sebesar Rp. 13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pemeliharaan Inventaris Kantor sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kendaraan Bermotor Roda 4 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah)

Dari total pagu anggaran belanja tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 229.707.443, (dua ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) (99,95)% sisa anggaran sebesar Rp. 107.557,- (seratus tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)

c. Penghapusan

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak mengajukan penghapusan sarana dan prasarana fasilitas gedung karena belum mendapatkan pengganti dari prasarana tersebut sehingga untuk sarana yang berupa meubelair, ada beberapa meja dan kursi yang kurang

layak namun masih tetap dipergunakan.

d. Kegiatan Administrasi Umum pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengelolaan kegiatan Urusan Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi pengurusan surat menyurat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1). Pengurusan surat-menyurat.

- a) Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk sebanyak 4278 (empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan) pucuk surat terdiri dari
 - Surat dari Pengadilan Agama Se Indonesia.
 - Surat dari Mahkamah Agung RI.
 - Surat dari Badan Peradilan Agama.
 - Surat dari perorangan dan instansi lain.

Surat-surat tersebut meliputi :

- OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 46 (empat puluh enam) pucuk surat
- HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 85 (delapan puluh lima) pucuk surat
- KP (Kepegawaian) sebanyak 19 (Sembilan belas) pucuk surat
- KU (Keuangan) sebanyak 206 (dua ratus enam) pucuk surat
- KS (Keseekretariatan) sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) pucuk surat
- PL (Perlengkapan) sebanyak 1567 (seribu lima ratus enam puluh tujuh) pucuk surat
- HK (Hukum) sebanyak 1648 (seribu enam ratus empat puluh delapan) pucuk surat
- PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 30 (Tiga puluh) pucuk surat
- PB (Pembinaan) sebanyak 508 (Lima ratus delapan) pucuk surat

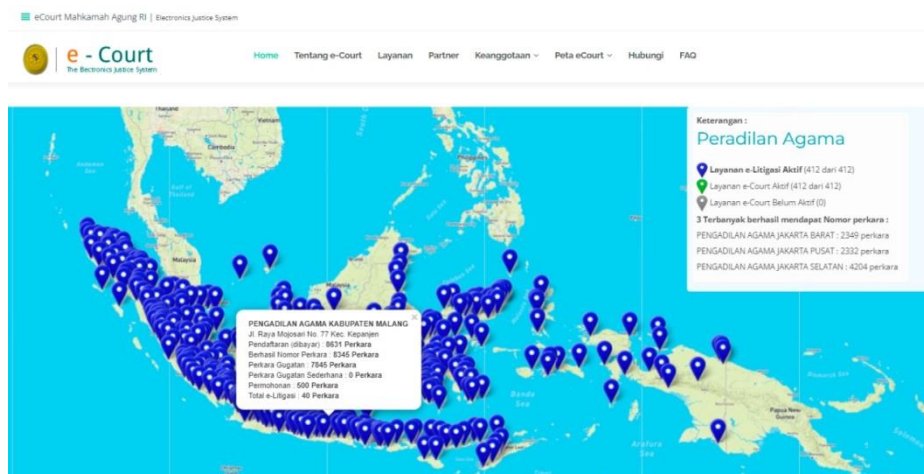
- PS (Pengawasan) sebanyak 10 (sepuluh) pucuk surat.
- SK (Surat Keputusan) sebanyak 13 (tiga belas) pucuk surat
(Lampiran 31)
- b) Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar sebanyak 8325 (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima) nomor surat, yang terdiri dari :
 - OT (Organisasi dan Tatalaksana) sebanyak 105 (seratus lima) pucuk surat
 - HM (Hubungan masyarakat) sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) pucuk surat
 - KP (Kepegawaian) sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) pucuk surat
 - KU (Keuangan) sebanyak 821 (delapan ratus dua puluh satu) pucuk surat
 - KS (Kesekretariatan) sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) pucuk surat
 - PL (Perlengkapan) sebanyak 3316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) pucuk surat
 - HK (Hukum) sebanyak 3011 (tiga ribu sebelas) pucuk surat
 - PP (Pendidikan dan Pelatihan) sebanyak 113 (seratus tiga belas) pucuk surat
 - PB (Pembinaan) sebanyak 118 (seratus delapan belas) pucuk surat
 - PS (Pengawasan) sebanyak 111 (seratus sebelas) pucuk surat.
(Lampiran 32)

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

▪ IMPLEMENTASI *E-COURT* DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Dasar hukum layanan *e-Court* adalah **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019** tentang **Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik**. Pengadilan Agama

Kabupaten Malang merupakan unit kerja Peradilan Agama tingkat pertama telah melaksanakan *e-Court* sejak Desember 2018 hingga sekarang. Sepanjang tahun 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berhasil mendapat nomor perkara melalui aplikasi *e-Court* sebanyak 2603 (dua ribu enam ratus tiga) perkara, Screenshot diambil pada tanggal 05-01-2022 pukul 09.02 WIB).



Pelaksanaan *e-Court* pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejauh ini telah berjalan lancar. Selanjutnya perlu adanya peningkatan instrumen pendukung *e-Court* berupa sosialisasi informasi *e-Court* kepada masyarakat sebagai Pengguna terdaftar lainnya seperti adanya banner, buku saku, brosur, dan media informasi lain tentang kemudahan layanan *e-Court*.

Diperlukan adanya sosialisasi informasi *e-Court* karena dengan menggunakan *e-Court* banyak kelebihan yang didapat, diantaranya adalah efisiensi waktu serta biaya *e-Court* lebih murah daripada persidangan konvensional. Dengan sistem ini juga nantinya bisa meminimalisir terjadinya korupsi dan pungutan liar, pasalnya intensitas para pencari keadilan untuk bertemu aparat keadilan otomatis berkurang. Dengan demikian integritas Pengadilan menjadi terjaga.

Meriviu kembali tentang definisi *Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik*, *Administrasi Perkara secara Elektronik* adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan Peradilan. Sedangkan persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain (Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2019). Pengguna Terdaftar setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat di mana Advokat disumpah, sedangkan persyaratan untuk Pengguna Lain adalah :

- a. Kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota, surat kuasa dan atau surat tugas dari kementerian/lembaga/badan usaha bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga dan badan usaha;
- b. Kartu tanda penduduk/paspor dan identitas lainnya untuk perorangan; dan
- c. Penetapan ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Faktanya, walaupun layanan administrasi perkara telah merata untuk semua kalangan, namun yang terbanyak dari pengajuan tersebut adalah Pengguna Terdaftar, sedangkan Pengguna Lain masih bisa dihitung dengan jari. Hal inilah yang mendasari Pengadilan Agama Kabupaten Malang membuat inovasi tentang tata cara pendaftaran

Pengguna Lain tanpa harus pergi ke kantor Pengadilan yakni secara online dan bisa diakses dari mana saja dengan link yang telah disediakan (www.pa-malangkab.go.id/ecourt).

Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan lembaga Peradilan dalam membangun era baru berbasis teknologi untuk melayani sebagai motto MA dalam Ulang Tahunnya yang ke 77 dengan tema "**Bangkit Bersama Tegakkan Keadilan**".

▪ **IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah dilaksanakan hingga saat ini. SIPP yang merupakan aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat yang dikembangkan secara terus-menerus oleh Mahkamah Agung RI untuk digunakan oleh lembaga Peradilan baik tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi secara nasional. Sistem ini dapat menjamin kevalidan struktur aplikasi dan data mengingat sinkronisasi database dilakukan secara *realtime* melalui internet. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim serta sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah

Aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang sama dengan yang digunakan oleh Pengadilan Agama lainnya yaitu memakai SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) versi terbaru 5.1.0 yang merujuk pada Pola Bindalmin yang dikomputerisasikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun semua instrumen Pola Bindalmin pengambilan data sudah terinput dalam aplikasi tersebut, mulai dari pendaftaran perkara,

berita acara sidang, putusan, pelaporan perkara, aplikasi Keuangan Perkara semua bisa terakses sehingga dengan aplikasi ini dapat memperingan beban tugas kita.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak henti-hentinya meningkatkan dan mempertahankan kinerja SIPP hingga pada bulan Februari 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih penghargaan atas Keberhasilan dalam meraih Peringkat 1 peraih 5 Besar SIPP selama satu tahun pada tahun 2021 berdasarkan nomor sertifikat 099/DjA/SERT/2/2022. Dan dalam penilaian rapor SIPP periode September 2022 Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih Rangking 1 Kinerja SIPP Pengadilan Agama kategori I Tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Serta pada akhir tahun bulan Desember 2022, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih Rangking 1 Kinerja SIPP Pengadilan Agama kategori I Tahun 2021 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Hal tersebut merupakan usaha dan upaya seluruh Aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja SIPP selama tahun 2022.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk diimplementasikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia dan yang menjadi salah satu rujukan program APM ini adalah standar ISO 9001–2015. APM juga memastikan bahwa standar yang disusun berkorelasi dengan standar pelayanan internasional.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengimplementasikan APM secara terukur dan mempunyai kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan yakni :

- a. Program APM yang diterapkan adalah berbasis manajemen risiko (risk based manage) maksudnya adalah antisipasi selalu dilakukan melalui proses melakukan mitigasi resiko dalam upaya mencegah kesalahan lebih luas dan menjaga konsistensi implementasi serta peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Berjalannya program APM ini sangat ditentukan oleh semangat dan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Agama untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan. Paling tidak ada dua hal menarik dari program ini yaitu pertama perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur Pengadilan Agama dan yang kedua adalah memberi jaminan kepada pelanggan atau para pihak yang berperkara bahwa Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan harapan.
- c. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2021 telah dilakukan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 1 dari yang sebelumnya telah menyelesaikan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap 1 dengan predikat “A” *Excellent*.
- d. Dengan adanya APM, maka terdapat standar baku mutu yang harus diterapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk melayani

masyarakat.

- e. Adapun layanan prima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang harus ditindaklanjuti pada hari yang sama yaitu :
 - a). Akta Cerai harus selesai pada hari yang sama pada saat pengucapan ikrar talak.
 - b). Salinan Penetapan isbat nikah harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakannya penetapan yang telah diputus.
 - c). Salinan Penetapan perwalian harus dapat diambil pada hari yang sama setelah dibacakan penetapan.
 - d). Setiap putusan pada hari tersebut dapat diminutasi (*One day minute*) untuk kemudian diupload putusan tersebut di direktori putusan Mahkamah Agung RI pada hari yang sama (*One day publish*).
 - e). Adanya Arema Plus *Card Gate System* yang memudahkan pelayanan secara prima kepada masyarakat karena akses mandiri yang dilakukan oleh para pihak berperkara baik ketika datang ke Pengadilan maupun akses mobile melalui aplikasi yang telah tersedia (*Arema Plus mobile*).

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PENGERTIAN:

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi Peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

TUJUAN

PTSP bertujuan:

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna layanan.

- c. Menjaga independensi dan imparial aparaturnya Pengadilan.

PRINSIP

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektifitas;
- e. Aksesibilitas;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas;

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.03/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pada era modernisasi saat ini, lembaga Peradilan perlu mendapat dukungan teknologi informasi yang mumpuni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga didapatkan pelayanan yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk menunjang prasyarat tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang trampil, baik dalam pengoperasian alat (*tools*) perangkat lunak-software maupun perangkat keras-hardware setelah kebutuhan prasarana tercukupi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menyiapkan 11 (sebelas) aplikasi inovasi pelayanan publik yang menunjang pelayanan publik secara umum, dan para pihak yang berperkara secara khusus serta mampu mempercepat pekerjaan dari aparaturnya Pengadilan, terutama pada masa transisi dari pandemi Covid-19. Hal ini tentu saja sejalan dengan mandat dari Mahkamah Agung RI, dimana pada Ulang tahunnya yang ke-77 menitikberatkan pada “Bangkit bersama, tegakkan keadilan”.

Dalam menyikapi hal tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berbenah diri dengan terus melakukan inovasi dan tidak berhenti namun tetap berkarya dan memberikan sumbangsih kepada dunia Peradilan, dimana dalam kurun waktu tersebut telah memiliki beberapa aplikasi andalan yang dipergunakan untuk area pelayanan publik yakni :

1. ***Aplikasi Maskarebet*** (Mengantri Sidang Tanpa Ribet), sebuah aplikasi yang berbasis web server dan tersedia pada website resmi, dengan mengambil dari database SIPP versi terbaru untuk memberikan informasi mengenai Jadwal Sidang kepada para pihak berperkara sekaligus dengan estimasi waktu pukul berapa akan disidangkan. Dengan aplikasi ini, para pihak yang berperkara tidak perlu lagi mengantri dan berjubel untuk mendapatkan nomor antrian karena penentuan antrian sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang menyidangkan untuk kemudian ditayangkan dalam website resmi Pengadilan selang 3 hari sebelum sidang. Hal ini tentu mempermudah dan mempercepat informasi kepada para pihak berperkara dan akan hadir mengikuti persidangannya pada jam yang telah ditentukan.
2. ***Aplikasi Info Perkara SMS gateway***, yang dimaksud di sini adalah informasi mengenai keseluruhan perkara dari yang bersangkutan melalui sms, dengan mengetik perintah tertentu maka didapat hasil yang diinginkan. Aplikasi ini juga sinkron dengan Maskarebet dalam hal penyampaian informasi sidang kepada para pihak yang berperkara sehingga mampu mempermudah para pihak berperkara untuk

menentukan kapan akan datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam bersidang untuk perkaranya.

3. **Aplikasi SIAGA (System Informasi Auto Replay)**, merupakan inovasi aplikasi untuk mengirimkan informasi jadwal sidang, akta cerai dan keuangan perkara melalui pesan whatsapp kepada para pihak berperkara ke nomor whatsapp yang terdaftar pada saat pendaftaran.
4. **Aplikasi Mesin Antrian PTSP**, yang menggunakan kiosK juga dengan layar Sentuh (*Touchscreen*), di dalamnya terdapat menu untuk *mengentry* nomor perkara, atau pilihan penggunaan layanan yang akan dituju, sehingga dengan demikian bisa tercetak nomor antrian layanan sesuai antriannya. Aplikasi ini membuat pelayanan menjadi lebih tertib dan antrian tidak menumpuk sehingga memudahkan proses berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
5. **Aplikasi Media Informasi Antrian Persidangan dan PTSP**, aplikasi yang berfungsi sebagai salah satu media mengenai kapan akan dipanggil sesuai antriannya, berapa nomor antrian yang telah dipanggil dan dengan menggunakan layar datar TV secara khusus mampu menjembatani sisi hiburan dalam batas waktu tunggu bagi para pihak berperkara dengan menyediakan informasi televisi nasional.
6. **Telescop**, singkatan dari Telusuri Surat Cerai Ori atau Palsu, yakni aplikasi berbasis web yang tersedia di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengecek apakah Akta Cerai telah terbit atau belum, berikut memberikan informasi mengenai keabsahan dan keaslian Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, hal ini tentu sangat berguna bagi para pihak berperkara dan juga pihak terkait seperti pihak KUA (Kantor Urusan Agama) ataupun bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai dan akan menikah lagi.
7. **AREMA PLUS card**, merupakan terobosan baru bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pihak berperkara, agar lebih tertib dan mudah dalam mengakses ruang pelayanan sekaligus merupakan pintu lapis keamanan pertama PA Kab. Malang

bagi para pihak berperkara yang akan memasuki ruang tunggu. Inovasi bernama **AREMA PLUS card**, dengan pintu masuk secara elektrik (*gate system*) mempunyai cara kerja sederhana dengan terlebih dahulu melakukan registrasi **AREMA PLUS card** untuk kemudian diberikan kepada para pihak berperkara pada saat pendaftaran perkara. Setelah proses registrasi kartu oleh petugas PTSP, maka para pihak dapat memasuki ruang tunggu melalui pintu elektrik dengan mendekatkan/tap **AREMA PLUS card** pada *gate sytem*, dan karena Server telah mengenali dan merespon kartu tersebut secara realtime, maka palang pintu akan terbuka secara otomatis dan bila kartu tidak terdaftar, maka palang pintu elektrik tidak akan terbuka. **AREMA PLUS card** juga mempunyai keunggulan lain seperti dapat melakukan tapping (tempel) pada mesin antrian sehingga secara otomatis akan tercetak nomor antrian dan disisi lain, **AREMA PLUS card** juga dapat digunakan untuk memantau informasi perkara serta layanan lainnya menggunakan aplikasi **AREMA PLUS mobile** yang login akunnya hanya dengan memindai qrcode pada **AREMA PLUS card** tersebut sehingga sangat mudah untuk digunakan para pihak berperkara mengingat **AREMA PLUS card** telah tersambung dengan database perkara SIPP.

8. **AREMA PLUS Mobile**, merupakan inovasi aplikasi layanan dengan berbasis aplikasi android. Aplikasi ini memiliki fitur yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi tentang Pengadilan Agama Kab. Malang seperti jadwal sidang, keuangan perkara, live chat dll. Aplikasi ini memudahkan pihak berperkara dalam mengakses informasi persidangan melalui smartphone.
9. **Buku Tamu Elektronik**, merupakan sebuah aplikasi Buku Tamu Digital untuk memudahkan dalam melakukan registrasi atau pendataan **tamu** maupun pengunjung yang datang, dengan cara memindai wajah tamu ataupun pengunjung pada kamera yang terpasang di meja resepsionis Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Setelah data tersimpan, tamu atau pengunjung mendapatkan *kartu tamu unik* bersistem RFID sehingga tidak akan tertukar dengan tamu atau pengunjung lain.

10. ***Drive-Thru***, merupakan inovasi layanan Pengambilan Produk Pengadilan secara Drive-Thru yang dikembangkan oleh Tim IT Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai sarana pengambilan produk pengadilan (Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan), Para pihak dapat menentukan tanggal dan jam pengambilan produk (Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan) Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui website dan datang pada waktu yang telah dipilih tanpa harus mengantri terlebih dahulu.

11. ***Pojok Konseling***, Pojok Konseling Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan inovasi yang dilatar belakangi oleh kepedulian Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kesehatan mental masyarakat pencari keadilan khususnya bagi penyandang disabilitas dan pemohon Dispensasi Kawin (DK). Hasil dari kegiatan konseling ini berupa catatan konseling yang kemudian akan menjadi dasar psikolog untuk memberikan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut kemudian akan dimasukkan pada berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Hal ini tercantum dalam pasal 15 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog.

12. ***Pengoptimalan Fasilitas Ruang Laktasi***, Pelayanan terhadap Ibu hamil dan Ibu menyusui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memerlukan perlakuan khusus yang harus disediakan terutama Ruang laktasi yang mana sangat dibutuhkan oleh Ibu hamil dan Ibu menyusui yang termasuk dalam kelompok rentan.

- Pemberian Wallpaper di sebagian dinding Ruang Laktasi
- Penggantian cover meja agar lebih menarik

- Penataan ruang laktasi terbaru
- Pemberian mainan anak-anak yang edukatif
- Pemberian poster edukatif bagi ibu menyusui
- Pemberian lemari pendingin untuk penyimpanan ASIP

13. **Pojok Informasi Bagi Perempuan,** Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca Perceraian. Untuk mendukung program Pengadilan Agama Kabupaten Malang ingin mengoptimalkan dengan cara membuat Pojok Informasi bagi Perempuan yang berisikan informasi mengenai Hak-hak perempuan dan anak diantaranya :

1. Formulir pengajuan gugat cerai yang mencantumkan permintaan nafkah
 2. Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum
 3. Hak-hak perempuan pada Pengadilan Agama
 4. Hak-hak perempuan dan anak setelah terjadi perceraian
 5. Cara memperoleh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
 6. Brosur pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian
- Pihak yang diharapkan mendukung Hak-hak Perempuan dan Anak
- Perempuan sebagai pemilik hak
 - Laki-laki sebagai kepala keluarga
 - Hakim dengan memberikan putusan yang adil
 - Advokat dengan memberikan bantuan hukum
 - Pegawai pengadilan yang bisa memberikan informasi dan pelayanan

Selain itu Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mengembangkan inovasi khusus bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan bukti komitmen Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi Pengadilan Inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Inovasi tersebut diantaranya adalah:

1. ***Layanan Khusus Disabilitas***, merupakan sebuah inovasi yang berupa fasilitas bagi pengandang disabilitas untuk mempermudah akses terutama di PA Kab Malang sehingga penyandang disabilitas dapat diperlakukan sama seperti lainnya. Fasilitas tersebut berupa halte disabilitas, jalur khusus disabilitas, toilet disabilitas, loket disabilitas, buku braile dan beberapa alat bantu seperti tongkat, kursi roda, dan alat bantu dengar.
2. ***Aplikasi Sistem Audio To Text Recording (ATR)*** adalah aplikasi untuk merubah suara menjadi teks dengan memanfaatkan aplikasi *google speech API (Application Programming Interface)* dengan fitur *translation*-nya sehingga semua proses tanya jawab dalam persidangan secara otomatis akan terekam dalam bentuk teks dan audio. Aplikasi ATR sudah terintegrasi langsung dengan SIPP 4.1.1. ATR yang ada di PA Kab. Malang terus mengalami pengembangan dan terakhir AVTR v.1 (Audio Video Teks *recording*) dimana kesemuanya akan secara otomatis terekam dalam bentuk video, audio dan teks secara simultan dan realtime dengan format *.webm yang mempunyai ukuran file lebih kecil dan tidak menghabiskan media penyimpanan. Aplikasi tersebut sangat berguna untuk penyandang disabilitas rungu mempermudah penyandang disabilitas rungu dalam mengikuti persidangan, karena percakapan selama persidangan terkonversi secara otomatis menjadi teks dan dapat terbaca pada layar komputer yang ada didepan para pihak, juga TV media yang ada di ruang sidang
3. ***Automatic Door Sensor Disabilitas (ADSD)***, merupakan sebuah inovasi yang berupa Kartu Prioritas Arema Gold yang diberikan kepada penyandang disabilitas sehingga dapat mengakses ke semua ruang pelayanan secara mandiri, dengan alat sensor dan terkoneksi dengan kartu yg dibawanya maka penyandang disabilitas khususnya

tuna netra akan mengetahui keberadaannya di ruang pelayanan/ruang sidang.

4. ***Deteksi Dini***, sebagai upaya peningkatan layanan inklusif bagi para penyandang disabilitas, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki Deteksi Dini Penyandang Disabilitas. Deteksi dini dilakukan dengan pengisian formulir penilaian personal penyandang disabilitas yang diisi pada saat pendaftaran. Sehingga dengan adanya deteksi dini ini, penyandang disabilitas dapat dipetakan dan diidentifikasi termasuk kategori penyandang disabilitas apa serta fasilitas apa saja yang dibutuhkan berdasarkan jenis disabilitas tersebut.
5. ***Brosur Informasi Berperkara Braille & Papan Penunjuk Arah Braille***, brosur informasi berperkara dalam huruf braille ini disediakan dalam rangka mempermudah akses layanan informasi berperkara khususnya persyaratan pengajuan perkara bagi penyandang disabilitas tuna netra di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Papan penanda arah dan papan penanda ruangan braille juga memudahkan pengunjung Pengadilan Agama Kabupaten Malang penyandang disabilitas tuna netra untuk mengetahui arah dan ruangan mana yang harus dituju.
6. ***Optimalisasi Antrian Pelayanan Perkara***, memberikan tanda kepada para pencari keadilan pada kelompok rentan untuk memudahkan petugas memberikan pelayanan prioritas secara tepat sasaran.
7. ***Brosur Audio Terintegrasi QR CODE bagi Kelompok Tuna Netra***, Brosur audio terintegrasi QR CODE ini merupakan brosur yang dibuat untuk mempermudah para pihak dari kelompok Tuna Netra untuk mengakses persyaratan pendaftaran perkara yang hendak didaftarkan.
8. ***Digitalisasi Peminjaman Fasilitas Alat Bantu Disabilitas***, memberikan kemudahan melalui digitalisasi kepada para pencari keadilan pada kelompok rentan dalam meminjam alat yang dibutuhkan.



BAB VI

PENGAWASAN

BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Mahkamah Agung selaku pengendali kebijakan bagi segenap aparatatur Pengadilan di seluruh Lembaga Peradilan dibawahnya selalu menekankan kedisiplinan dan meningkatkan pengawasan intern secara ketat dan transparan. Keseriusan Mahkamah Agung dalam pembenahan internal tersebut tergambar dari terbitnya regulasi 3 Perma yang sejalan dengan cetak biru Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kurun waktu 5 tahunan kedua, yakni tahun 2020-2024, yakni Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Perma Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di Bawahnya.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu instrument manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan. Di dalam lingkungan peradilan, pengawasan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

1. PENGAWASAN MELEKAT

Yang dimaksud Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016).

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara terus-menerus mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : Nomor : W13-A35/5490/PS.01/SK/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan Pembina Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Berdasarkan surat tersebut telah dilaksanakan pengawasan bidang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada triwulan I, II, III dan IV tahun 2022 dan ditemukan beberapa temuan yang telah ditindaklanjuti dan dilaporkan pada Laporan Tindak Lanjut Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022. Bahkan laporan temuan dan tindak lanjut tersebut dipampang dalam website resmi Pengadilan guna mendapatkan perhatian

dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

2. PENGAWASAN FUNGSIONAL

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah *pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Pengawasan fungsional dalam Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan tugas dan fungsi secara khusus untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung (Pasal 1 angka (2) Perma No.8 Tahun 2016). Terkait hal ini, maka pengawasan fungsional Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya selaku atasan langsung dan Badan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** (disingkat APIP) di Lembaga Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Malang bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan secara langsung bisa diketahui kekurangan – kekurangan dalam pelaksanaan tugas, dan hasilnya baik walaupun tentunya masih ada kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki.

3. PENGAWASAN RUTIN

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam melaksanakan

pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat / bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim Pengawas Mahkamah Agung RI. yang masuk dalam Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Bawas MARI.)

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran atau email : pa.kab.malang@gmail.com serta melalui nomor ponsel pengaduan yang cepat dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai. Selain itu dalam menghadapi tuntutan masyarakat secara langsung, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah pula menempatkan petugasnya dalam layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) guna penyelesaian yang cepat dan mudah.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint yang terkoneksi secara online melalui aplikasi dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan url : absensi.pta-surabaya.go.id maupun secara manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi online tersebut dan manual secara langsung dengan mencocokkan pada hasil print out fingerprint setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 serta Perma Nomor 7 tahun 2016 tentang tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

B. EVALUASI PENGAWASAN

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan rapat dinas secara berkala kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna melakukan evaluasi kerja atas tugas dan tanggungjawab masing-masing mengingat salah satu kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama adalah melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik Hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Bahkan, hasil dari Rapat dinas secara berkala tersebut dapat diakses oleh publik di Laman resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai wujud keterbukaan informasi.
2. Mengadakan assessment internal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya administrasi baik dibidang manajemen, kepaniteraan maupun kesekretariatan terkait dengan mutu baku APM pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh jajaran terkait atas hasil rapat pembinaan, rapat kerja nasional maupun rapat kerja daerah baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksian dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan

- yang ditemukan.
- c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilakukan evaluasi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melakukan monev atas hasil temuan Hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris serta jajarannya agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam skala prioritas.
 - e. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
 - f. Surat Keputusan, struktur, temuan dan tindaklanjut tersebut dapat pula diakses oleh publik di website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga mampu menciptakan iklim budaya kerja cepat, efisien dan efektif serta mampu beradaptasi pada perubahan.
5. Mengadakan rapat koordinasi berupa *Coffee Morning* yang dilaksanakan setiap minggu yang diikuti oleh seluruh jajaran hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan PPNPN. Kegiatan *Coffee Morning* ini dilaksanakan untuk menjadi forum diskusi antara pimpinan dan aparatur PA Kab. Malang untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian perkara tahun 2022 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara tahun 2021 sebanyak sejumlah 863 (delapan ratus enam puluh tiga) perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 9.569 (sembilan ribu lima ratus enam puluh sembilan) perkara dengan total total perkara yang ditangani sejumlah 10.432 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh dua) perkara dan telah berhasil diperiksa, diputus dan diselesaikan sebanyak 9.571 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu) perkara (91,75%) (sembilan puluh satu koma tujuh puluh lima persen), sisanya sebanyak (8,25%) (delapan koma dua puluh lima persen). Dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) perkara (2,57%) dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 sebesar 9.325 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh lima) perkara. Dengan demikian ada peningkatan perkara putus sebanyak 246 perkara (2,57%) dibandingkan dengan perkara yang diselesaikan pada tahun 2021. Presentase penyelesaian perkara (minutasi) tersebut telah sama dengan data monitoring SIPP versi 5.1.0 Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan *Realtime* rasio penanganan perkara SIPP sebesar 91,75%. Adapun sisa perkara yang masih 8,25% tersebut sebagian besar karena pemanggilannya melalui mass media massa dan pendaftaran di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan untuk disidangkan dalam waktu dekat karena para pihak harus dipanggil terlebih dahulu secara resmi dan patut.
2. Perkara yang dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2022 sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara dan telah diputus pada tahun 2022 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara

(81%). Selanjutnya perkara yang dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) perkara. Kemudian terdapat 1 perkara mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI pada tahun 2022.

3. Pelaksanaan tugas di bidang Manajemen, Kepaniteraan (administrasi perkara) dan Sekretariat (administrasi umum) telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan Pedoman yang terdapat pada buku panduan Program Akreditasi Penjaminan Mutu yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. dalam menentukan mutu baku kualitas pelayanan dan tertib administrasi. Pada bulan November 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melaksanakan Surveillance ke-1 APM oleh Tim APM Pusat dan setelah dilakukan audit eksternal oleh Tim tersebut.
4. Target Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 telah terpenuhi dengan baik, dari target 100%, terealisasi sebesar 99,42% dan sisa 0,58% dengan perincian untuk Belanja Pegawai terealisasi sebesar 99,27%, Belanja Barang baik operasional maupun non operasional terealisasi sebesar 99,95% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 99,82%, sedangkan DIPA 04 mampu terserap 99,80% sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari penggunaan dana DIPA 04 di 3 (tiga) Area pelayanan publik yakni Sidang keliling, Pos Bantuan Hukum dan Perkara Prodeo (biaya gratis).
5. Program prioritas pembaruan sebagaimana 8 area perubahan yang dicanangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai implementasi dari Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI yakni 1. Manajemen Perubahan, 2. Deregulasi Kebijakan, 3. Penataan dan penguatan organisasi, 4. Penataan tatalaksana, 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur, 6. Penguatan akuntabilitas, 7. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terus menerus dilakukan sesuai dengan SOP dengan sistem yang terencana dan komprehensif dan pula telah dikongkritkan sebagiannya dengan program-program prioritas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

pada tahun 2022 meliputi: 1. Penyelesaian perkara tepat waktu (*one day publish*) ; 2). Manajemen SDM; 3). Pengawasan/Pengaduan; 4). Pengelolaan website; 5). Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan 6). Implementasi Program Legislasi Nasional yakni “*Justice for all*” yang terdiri dari perkara prodeo, sidang keliling dan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum).

6. Penatausahaan tugas di bidang Kesekretariatan telah memakai tools atau aplikasi yang secara umum dapat dibagi sebagai berikut :
 - a. Sekretariat : KOMDANAS dan SIMARI;
 - b. Bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP dan SIKEP ABS;
 - c. Bagian Umum dan Keuangan memakai sistem aplikasi GPP sedangkan berbasis web : SIMFONY PNBPN, SIMAN dan OMSPAN, SAKTI;
 - d. Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan memakai sistem aplikasi SATUDJA online, SAKTI, E-MONEV, LPSE, SIRUP, KINSATKER, E-IPLANS, E-BIMA dan SIMTALAK.

Yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan aturan yang ditetapkan.

7. Secara kumulatif nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan baik bahkan pada bulan Desember 2022 mendapatkan penghargaan Rangking 1 atas Hasil Kinerja SIPP Kategori I dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

B. REKOMENDASI

1. Kepada masyarakat pencari keadilan, hendaknya terus memberikan penyuluhan dan kesadaran hukum agar tidak serta merta ingin segera cepat selesai terhadap kasus hukum yang sedang dijalaninya, mengingat proses hukum pada Pengadilan adalah menerima untuk

kemudian memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon untuk meninjau Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena masih membutuhkan anggaran belanja modal untuk perluasan gedung kantor terutama untuk ruang Aula, ruang Hakim, ruang Panitera Pengganti, ruang Panitera Muda dan ruang Kepala Sub Bagian.
3. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon dapat mengupayakan peningkatan belanja modal peralatan dan mesin berupa laptop dan printer untuk mendukung percepatan administrasi peradilan.
4. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon dapat mengupayakan anggaran perawatan Gedung Arsip karena selama ini belum tercover di DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk perawatan Gedung tersebut.

C. PENUTUP

Secara runtut dan sistematis, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah bentuk realisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama 1 tahun berjalan dan hal ini adalah hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait mulai dari jajaran Pimpinan, para Hakim, pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh staf yang telah berupaya maksimal untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun sebelumnya sehingga didapat pula hasil maksimal dengan meraih penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian, secara umum pelaksanaan tugas pokok telah menunjukkan arah perbaikan dari tahun sebelumnya sehingga menumbuhkan harapan baru akan tercapainya target realisasi tugas pokok dan fungsi aparatur

Pengadilan pada tahun depan dengan lebih sempurna, sistematis dan tertib administrasi.

Dengan sistematika laporan (*outline*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI, menjadikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tampil lebih sederhana dan lebih mudah dalam pembuatannya namun lengkap dan terperinci serta terarah pada program dan kegiatan serta capaian kinerja sehingga hal ini jelas sangat membantu dalam pembuatan Laporan mengingat laporan inilah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Kami pun sadar tentu masih ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mohon masukan ataupun kritikan yang konstruktif dari semua pihak terkait sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan dan perubahan terhadap sempurnanya laporan dimaksud.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan laporan ini. Mudah-mudahan kita sekalian tetap memperoleh Rahmat, Taufiq, dan Hidayah dari Allah SWT. Aamiin Yaa Rabbal Alamin.

Kepanjen, 31 Desember 2022

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002.199603.1.001



LAMPIRAN

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infag/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Jumlah	Keterangan
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengeshan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pewalian	Pencabutan kekuasaan Wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adilol										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Januari	0	0	0	1	0	254	657	3	4	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	21	0	193	4	0	1	0	0	0	0	14	3	1164	
2	Februari	1	0	0	0	0	154	393	1	3	0	1	0	1	3	0	0	0	2	0	72	0	105	6	0	2	0	0	0	0	12	1	757	
3	Maret	0	0	0	1	0	165	498	1	1	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	46	0	70	3	0	5	0	0	0	0	9	4	815	
4	April	2	0	0	1	0	80	203	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	8	0	90	3	0	2	0	0	0	0	4	2	404	
5	Mei	0	0	0	0	0	192	478	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	8	0	84	3	1	3	0	0	0	0	7	2	788	
6	Juni	1	0	0	0	0	202	576	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	18	0	181	2	0	1	0	2	0	0	17	2	1011	
7	Juli	1	0	0	0	0	175	456	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	25	0	63	6	0	3	0	0	0	0	12	3	753	
8	Agustus	1	0	0	0	0	195	501	2	1	0	0	0	0	10	0	0	0	6	0	13	0	82	2	0	4	0	2	0	0	2	4	825	
9	September	0	0	0	1	0	105	300	2	0	0	0	0	0	10	0	0	0	11	0	87	0	112	2	0	2	0	0	0	0	11	6	649	
10	Oktober	0	0	0	0	0	214	558	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0	22	0	189	6	0	2	0	0	0	0	9	2	1018	
11	November	0	0	0	0	0	115	304	2	1	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	18	0	142	2	0	1	0	0	0	0	12	0	607	
12	Desember	1	0	0	0	0	182	426	1	5	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0	12	0	123	6	0	3	0	0	0	0	11	0	778	
JUMLAH		7	0	0	4	0	2033	5350	22	16	0	1	0	1	72	0	0	0	51	0	350	0	1434	45	1	29	0	4	0	0	120	29	9569	

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,


 Drs. H. Sahatono, S.Ag., S.H., M.H.
 NIP. 19721002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Panitera,


 Drs. H. Badawi Asy'ari, S.H., M.H.
 NIP. 19650209.199303.1.002

LAPORAN PERKARA YANG DIPUTUS
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

Nomor	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Sisa bulan lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dicabut	A. Perkawinan																							B. Ekonomi Syariah	C. Kewarisan	D. Wasiat	E. Hibah	F. Wakaf	G. Zakat/Infra/Shodaqoh	H. P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak diterima	Gugur	Dicoret Dari Register	Jumlah	Sisa Akhir Bulan	Perkara yang sudah di minutas	Keterangan
						Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengusaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	'Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlol																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Januari	863	1164	2027	69	1	0	0	0	0	240	634	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	9	0	149	2	0	1	0	0	0	0	6	3	8	12	7	0	1150	877	1150		
2	Februari	877	757	1634	50	0	0	0	1	0	131	344	1	2	0	0	0	3	0	0	0	1	0	15	0	115	4	0	0	0	0	0	0	8	1	5	1	2	0	684	950	684		
3	Maret	950	815	1765	72	1	0	0	1	0	141	405	1	3	0	0	0	5	0	0	0	4	0	95	0	93	5	0	1	0	0	0	0	6	2	12	13	4	0	864	901	864		
4	April	901	404	1305	51	0	0	0	1	0	84	270	3	1	0	1	0	0	8	0	0	0	2	0	8	0	88	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	7	0	535	770	535	
5	Mei	770	788	1558	42	1	0	0	1	0	113	339	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	5	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	5	3	0	584	974	584	
6	Juni	974	1011	1985	81	0	0	0	0	0	210	528	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	9	0	164	3	0	0	0	0	0	0	9	1	7	8	6	1	1032	953	1032		
7	Juli	953	753	1706	51	0	0	0	0	0	155	437	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	12	0	101	3	0	0	0	0	0	0	6	1	6	3	6	0	787	919	787		
8	Agustus	919	825	1744	66	1	0	0	0	0	170	424	2	0	0	0	0	11	0	0	0	3	0	17	0	75	3	0	1	0	0	0	0	4	3	6	11	5	1	803	941	803		
9	September	941	649	1590	48	1	0	0	0	0	147	406	1	0	0	0	0	3	0	0	0	7	0	70	0	113	3	0	0	0	0	0	0	5	3	7	15	2	0	831	759	831		
10	Oktober	759	1018	1777	44	0	0	0	0	0	169	410	2	0	0	0	0	8	0	0	0	5	0	17	0	163	3	0	0	0	0	0	0	6	1	14	6	13	0	861	916	861		
11	November	916	607	1523	58	0	0	0	1	0	136	360	3	0	0	0	0	5	0	0	0	6	0	14	0	135	2	0	0	0	0	0	0	5	1	11	11	6	0	754	769	754		
12	Desember	769	778	1547	50	0	0	0	0	0	122	330	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	12	0	136	3	0	1	0	1	0	0	5	0	8	10	3	0	686	861	686		
	JUMLAH	863	9569	10432	682	5	0	0	5	0	1818	4887	14	7	0	1	0	0	64	0	0	0	37	0	283	0	1393	33	0	4	0	1	0	0	65	17	91	98	64	2	9571	10590	9571	

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197110021996031.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Panitera,

Dr. H. Sadawati Syahar, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199303.1.002

**SISA PERKARA MENURUT JENISNYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

Nomor	Jenis Perkara SATKER	Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	A. Perkawinan																							Jumlah	Keterangan								
					Izin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelalaian atas kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Penguasaan anak	Nafkah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Perwalian	Pencabutan kekuasaan wali	Penunjukan orang lain	Ganti rugi terhdp wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	'Isbat Nikah	Izin kawin	Dispensai kawin	Wali Adlo'i										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG	863	9569	10432	1	0	0	0	0	234	567	3	4	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	8	0	21	4	0	7	0	0	0	0	7	0	861	
JUMLAH		863	9569	10432	1	0	0	0	0	234	567	3	4	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	8	0	21	4	0	7	0	0	0	0	7	0	861	

Mengesahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19741002.1996031.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Panitera,

Dr. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.
NIP. 19650209.1993031.002

PERKARA PUTUS YANG BELUM DIMINUTASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

[illegible]

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022

Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199308.1.002

PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalan	Tidak dapat diterima	
1	5330/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	15/12/2021	11/01/2022	18/02/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
2	6436/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	06/01/2022	31/01/2022	16/03/2022	✓			
3	6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	08/02/2022	11/02/2022	07/04/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
4	346/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	10/02/2022	22/02/2022	29/03/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
5	5753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	02/03/2022	22/03/2022	10/05/2022			✓	
6	477/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	22/03/2022	23/03/2022	27/04/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
7	948/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	28/03/2022	08/04/2022	30/05/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
8	310/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	28/03/2022	08/04/2022	06/06/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
9	314/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	04/04/2022	11/04/2022	08/06/2022			✓	
10	1566/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	25/04/2022	09/05/2022	11/07/2022	✓			

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
11	826/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	27/04/2022	19/05/2022	21/07/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
12	5607/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	13/04/2022	02/06/2022	02/08/2022	✓			
13	1345/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	24/05/2022	03/06/2022	15/07/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
14	2548/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	30/05/2022	09/06/2022	11/08/2022	✓			
15	1072/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	02/06/2022	15/06/2022	04/08/2022	✓			
16	2390/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	08/06/2022	17/06/2022	11/08/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
17	3518/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	12/07/2022	19/07/2022	13/09/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
18	1652/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	20/07/2022	05/08/2022	22/09/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
19	2426/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	11/08/2022	23/08/2022	06/10/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
20	4047/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	15/08/2022	20/09/2022	17/11/2022	✓			Menguatkan Putusan Pengadilan

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalakan	Tidak dapat diterima	
								Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
21	4699/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	20/09/2022	27/09/2022	16/11/2022	✓			
22	3652/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	08/09/2022	30/09/2022	08/11/2022			✓	
23	5007/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	29/09/2022	07/10/2022	24/11/2022	✓			
								Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memperbaiki amar putusan.
24	5381/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	02/11/2022	07/11/2022	20/12/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
25	5360/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	15/11/2022	23/11/2022					Berkas telah dikirim ke PTA Surabaya
26	5536/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	14/11/2022	23/11/2022	15/12/2022		✓		Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dengan mengadili sendiri.
27	4315/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	09/11/2022	23/11/2022					Berkas telah dikirim ke PTA Surabaya
28	5213/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	22/11/2022	29/11/2022					Berkas telah dikirim ke PTA Surabaya
29	5207/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	23/11/2022	05/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
30	2445/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	30/11/2022	12/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
31	5214/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	24/11/2022	14/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya

No	Nomor Perkara	Tanggal			Amar Putusan Banding			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Daftar Banding	Putusan Tk. Banding	Dikuatkan	Dibatalkan	Tidak dapat diterima	
32	2508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	15/12/2022	23/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
33	6439/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	20/12/2022	26/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
34	5937/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	14/12/2022	27/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
35	6647/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	21/12/2022	28/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya
36	6164/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	20/12/2022	29/12/2022					Berkas belum dikirim ke PTA Surabaya

Mengetahui :

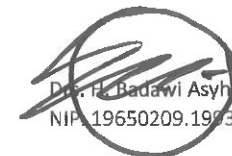
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Dr. H. Suharto, S.Ag., S.H., M.H.
NIP.19611102.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022

Panitera,



Dr. H. Badawi Asyihari, S.H., M.H.
NIP.19650209.199303.1.002

PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal			Putusan Tk. Kasasi	Amar Putusan Kasasi			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Putusan Tk. Banding	Daftar Kasasi		Dikabulkan	Ditolak Tk. Kasasi	Tidak dapat diterima Tk. Kasasi	
1	1728/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	11/10/2021	23/12/2021	18/01/2022	03/08/2022		✓		
2	5323/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	16/12/2021	01/03/2022	24/03/2022	11/10/2022		✓		
3	6240/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	08/02/2022	07/04/2022	25/04/2022	28/11/2022	✓			
4	477/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	22/03/2022	27/04/2022	12/05/2022	28/11/2022		✓		
5	5753/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	02/03/2022	10/05/2022	19/05/2022					Berkas telah dikirim ke MA RI
6	314/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	04/04/2022	08/06/2022	24/06/2022					Berkas telah dikirim ke MA RI
7	826/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	27/04/2022	21/07/2022	15/08/2022					Berkas telah dikirim ke MA RI
8	5607/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg	13/04/2022	02/08/2022	25/08/2022					Berkas telah dikirim ke MA RI
9	1652/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	20/07/2022	22/09/2022	05/10/2022					Berkas telah dikirim ke MA RI
10	5536/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	14/11/2022	15/12/2022	27/12/2022					Berkas belum terkirim ke MA RI

Mengingat :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

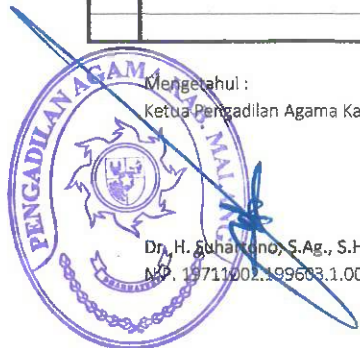
Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 1971102.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Panitera,

Dr. H. Basawati Asyharli, S.H., M.H.
NIP. 19650209.199303.1.002

PUTUSAN YANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal				Amar Putusan Kasasi			Keterangan
		Putusan Tk. Pertama	Putusan Tk. Banding	Putusan Tk. Kasasi	Daftar PK	Dikabulkan	Ditolak Tk. Kasasi	Tidak dapat diterima Tk. Kasasi	
1	127/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg	09/05/2022	-	18/01/2022	26/09/2022	-	-	-	Berkas telah dikirim ke MA RI



Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Dr. H. Suharno, S.Ag., S.H., M.H.
Np. 1371102.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Panitera,



Dr. H. Dadawati Asyharu, S.H., M.H.
Np. 19650209.199303.1.002

LAPORAN MEDIASI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022

No	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Diterima Tahun Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Jumlah Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih dalam proses	Sisa Perkara Tahun ini	Keterangan
					Gagal	Berhasil	Tidak Layak			
1	863	9569	9666	894	621	141	4	0	861	

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

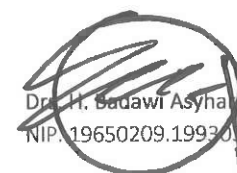


Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022

Panitera,



Dr. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.

NIP. 19650209.199303.1.002

**LAPORAN LAYANAN POSBAKUM
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

No	Bulan	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah	Sisa	Jumlah Layanan	Jumlah Penerima Layanan	Keterangan
1	Januari	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000	-	954 orang	
2	Februari	Rp 100.000.000	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000	-	579 orang	
3	Maret	Rp 100.000.000	Rp 18.204.000	Rp 18.204.000	Rp 81.796.000	246 jam	622 orang	
4	April	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 27.306.000	Rp 72.694.000	123 jam	348 orang	
5	Mei	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 36.408.000	Rp 63.592.000	123 jam	503 orang	
6	Juni	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 45.510.000	Rp 54.490.000	123 jam	839 orang	
7	Juli	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 54.612.000	Rp 45.388.000	123 jam	523 orang	
8	Agustus	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 63.714.000	Rp 36.286.000	123 jam	622 orang	
9	September	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 72.816.000	Rp 27.184.000	123 jam	732 orang	
10	Oktober	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 81.918.000	Rp 18.082.000	123 jam	656 orang	
11	November	Rp 100.000.000	Rp 9.102.000	Rp 91.020.000	Rp 8.980.000	123 jam	629 orang	
12	Desember	Rp 100.000.000	Rp 8.954.000	Rp 99.974.000	Rp 26.000	121 jam	602 orang	
JUMLAH		Rp 100.000.000	Rp 99.974.000	Rp 99.974.000	Rp 26.000	1351 jam	7609 orang	

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

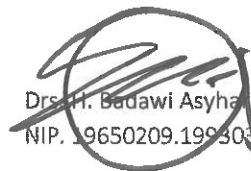


Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19741002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022

Panitera,



Dr. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.

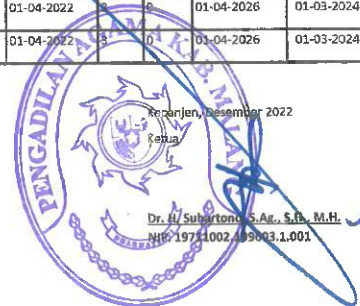
NIP. 19650209.199303.1.002

DATA STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DESEMBER TAHUN 2022

LAMPIRAN-10

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JABATAN	MASA KERJA SESUAI SK PANGKAT TERAKHIR					KENAIKAN YAD		TANGGAL	KETERANGAN
							PANGKAT	GOL	TMT	TH	BLN	PANGKAT	GAJI BERKALA	PENSIUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	L	Lamongan,	02-10-1971	Ketua / Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2020	24	1	01-04-2024	01-03-2022	01-11-2036	
2	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	19740807.199803.2.001	P	Surabaya,	07-08-1974	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2022	24	1	01-04-2026	01-03-2022	01-09-2039	
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	L	Gambut,	05-06-1961	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	31	1	01-04-2024	01-03-2023	01-07-2026	
4	Drs. Maksum, M.Hum	19640316.199203.1.002	L	Ponorogo,	16-03-1964	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2016	28	7	01-10-2020	01-03-2022	01-04-2029	
5	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	L	Blitar,	05-01-1967	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	27	1	01-04-2023	01-03-2022	01-02-2032	
6	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	P	Sidoarjo,	15-03-1965	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2021	28	1	01-04-2025	01-03-2023	01-04-2030	
7	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	L	Blitar,	15-07-1965	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/c	01-04-2019	25	1	01-04-2023	01-03-2022	01-08-2030	
8	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	P	Blitar,	07-04-1970	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2022	01-05-2035	
9	Drs. H. Muh. Kasym, M.H.	19601231.199403.1.027	L	Ganra, Soppeng	31-12-1960	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2020	26	1	01-04-2024	01-03-2022	01-01-2026	
10	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	L	Gresik,	25-09-1966	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2022	28	1	01-04-2026	01-03-2022	01-10-2031	
11	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	P	Blitar,	14-04-1969	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2019	25	1	01-04-2023	01-03-2022	01-05-2034	
12	Drs. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	P	Malang,	01-03-1968	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-10-2019	25	7	01-10-2023	01-03-2022	01-04-2033	
13	Dra. Hj. Rasmulyeni, M.H.	19641007.199003.2.001	P	Amuntal,	07-10-1964	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-04-2019	28	1	01-04-2023	01-03-2022	01-11-2029	
14	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	L	Subang,	03-08-1963	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	01-10-2019	28	7	01-10-2023	01-03-2023	01-09-2028	
15	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	L	Lamongan,	09-08-1968	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	01-04-2021	28	10	01-04-2025	01-08-2022	01-09-2033	
16	Drs. H. Badawi Asyhar, S.H., M.H.	19550209.199303.1.002	L	Blitar,	09-02-1955	Penitera	Pembina Tk. I	IV/b	01-10-2018	25	7	-	01-03-2023	01-03-2025	Pangkat Maksimal
17	Maulana Musa Sugl Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	L	Pasuruan,	21-10-1972	Sekretaris	Pembina Tk. I	IV/b	01-04-2020	22	1	01-04-2024	01-03-2022	01-10-2030	
18	Widodo Suparjyento, S.H.I., M.H.	19710101.199703.1.012	L	Gunung Kidul,	01-01-1971	Penitera Muda Hukum	Pembina	IV/a	01-10-2022	20	7	01-10-2022	01-03-2022	01-02-2031	
19	Hadjah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	P	Tidore Kepulauan,	11-08-1969	Penitera Muda Permohonan	Penata	III/c	01-10-2021	23	0	01-10-2024	01-10-2023	01-09-2029	
20	Idhe Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	P	Malang,	31-08-1985	Penitera Muda Gugatan	Penata	III/c	01-04-2019	8	0	01-04-2023	01-04-2023	01-09-2045	
21	Buyung Tumenggong, S.Kom.	19750404.200912.1.002	L	Surabaya,	04-04-1975	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d	01-10-2020	10	10	01-10-2024	01-12-2023	01-05-2033	
22	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	L	Sumenep,	18-07-1980	Kasubbag Perencanaan, Ti dan Pelaporan	Penata Tk. I	III/d	01-04-2021	15	1	01-04-2025	01-03-2024	01-08-2038	
23	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	P	Lumajang,	11-04-1987	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Penata	III/c	01-10-2020	7	10	01-10-2024	01-12-2022	01-05-2045	
24	Djazilatur Rachmech, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	P	Tuban,	08-08-1969	Penitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-10-2017	22	10	-	01-12-2022	01-09-2029	Pangkat Maksimal
25	Mestur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	L	Nganjuk,	08-08-1968	Penitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-04-2009	12	0	-	01-03-2023	01-09-2028	Pangkat Maksimal
26	Homsiyah, S.H., M.H.	19650428.199012.2.001	P	Sempang,	28-04-1966	Penitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2020	24	4	-	01-12-2023	01-05-2026	Pangkat Maksimal
27	Almatus Syaladah, S.Ag. M.H.	19720404.199803.2.005	P	Blitar,	04-04-1972	Penitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2018	20	1	-	01-03-2022	01-05-2032	Pangkat Maksimal
28	Dra. Hj. Siti Djayedaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	P	Blitar,	27-10-1966	Penitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-10-2017	17	7	-	01-03-2022	01-11-2026	Pangkat Maksimal
29	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	P	Probolinggo,	08-07-1968	Penitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-10-2016	22	7	-	01-03-2022	01-08-2028	Pangkat Maksimal
30	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	L	Walgapu,	26-05-1965	Penitera Pengganti	Pembina	IV/a	01-04-2014	16	1	-	01-03-2022	01-06-2025	Pangkat Maksimal
31	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	L	Malang,	14-11-1978	Penitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2019	11	7	01-10-2023	01-03-2022	01-12-2038	
32	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	L	Blitar,	20-03-1979	Penitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	01-04-2020	10	11	01-04-2023	01-03-2023	01-04-2039	
33	Wiwlin Sulistiyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	P	Pasuruan,	01-05-1971	Penitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2021	23	0	01-10-2024	1-10-2023	01-06-2031	
34	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	L	Malang,	19-12-1974	Penitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	01-04-2020	15	6	01-04-2024	01-10-2022	01-01-2035	

35	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	P	Banyuwangi,	09-10-1978	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2022	18	3	01-10-2022	01-07-2022	01-11-2038	
36	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.012	L	Bondowoso,	26-09-1987	Panitera Pengganti	Penata	III/c	01-10-2020	7	9	01-10-2024	01-01-2023	01-10-2047	
37	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	L	Mansio,	07-11-1984	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	01-10-2019	10	6	01-10-2023	01-04-2023	01-12-2044	
38	Yussl Candra Rudlansyah, S.H., M.H.	19650119.198703.1.001	L	Surabaya,	19-01-1966	Jurusita	Penata Tk. I	III/d	01-10-2021	26	7	01-10-2025	01-03-2023	01-02-2024	
39	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	P	Malang,	24-03-1987	Analisis Kepegawain Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	02-03-2020	1	0	01-04-2023	01-03-2023	01-04-2045	
40	Ritzky Ananda Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	P	Malang,	21-04-1994	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	02-03-2020	1	0	01-04-2023	01-03-2023	01-04-2052	
41	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	19940918.202012.2.007	P	Malang,	18-09-1994	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	01-07-2022	1	7	01-04-2025	01-12-2022	01-10-2052	
42	Venny Aivionita A.Md.	19951223.202012.2.008	P	Malang,	23-12-1995	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	03-01-2022	4	1	01-04-2025	01-12-2022	01-01-2055	
43	Sutik	19650518.201405.1.001	L	Malang,	18-05-1965	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/c	01-10-2022	30	8	01-10-2022	01-02-2023	01-06-2023	
44	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	L	Malang,	04-09-1969	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/c	01-10-2022	25	0	01-10-2022	01-10-2022	01-10-2027	
45	Mochammad Yoesuf, S.H.	19900503.202203.1.003	L	Malang,	03-05-1990	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	01-04-2022	0	0	01-04-2026	01-03-2024	01-06-2048	
46	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	19950714.202203.1.004	L	Jombang,	14-07-1995	CPNS Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda	III/a	01-04-2022	0	0	01-04-2026	01-03-2024	01-08-2053	
47	Sindy Siska Silvana, S.H.	19960913.202203.2.016	P	Bantul,	13-09-1996	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	19-04-2022	0	0	01-04-2026	01-03-2024	01-10-2054	
48	Zidne Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	P	Sorong,	11-02-1999	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	03-04-2022	0	0	01-04-2026	01-03-2024	01-03-2057	
49	Desy Ayu Rachmedany, A.Md	19940213.202203.2.016	P	Malang,	13-02-1994	CPNS Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	01-04-2022	3	0	01-04-2026	01-03-2024	01-03-2052	
50	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	L	Malang,	10-06-1994	CPNS Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	01-04-2022	6	0	01-04-2026	01-03-2024	01-07-2052	
51	Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md.	19940729.202203.1.011	L	Medan,	29-07-1994	CPNS Pengelola Barang Milik Negeri	Pengatur	II/c	01-04-2022	3	0	01-04-2026	01-03-2024	01-08-2052	



DATA PEGAWAI PPNPN DIPA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 11

NO	NAMA PEGAWAI	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KETERANGAN
1	Much. Yusuf Al Jihad, S.H	L	Malang,	01-03-1982	Pramubakti
2	Beni Suprayogi	L	Jember,	20-10-1967	Satpam
3	Yulianto	L	Malang,	29-04-1986	Pramubakti
4	M. Imron	L	Sampang,	12-03-1975	Pramubakti
5	Muchamad Diki Fardiansyah,S.H.	L	Malang,	04-11-1989	Pramubakti
6	Muhabik Yusyafara	L	Malang,	08-07-1988	Pramubakti
7	Moh. Rizza Suryanatha, S.P., S.H.	L	Surabaya,	01-10-1980	Pramubakti
8	Neneng Kusriani	P	Sumenep,	31-10-1974	Pramubakti
9	Maulidin Alfa Hikmawan	L	Madiun,	25-12-1982	Pengemudi
10	Moh. Saezal D.P.P.	L	Madiun,	03-03-1988	Pramubakti
11	Trami Utari, S.H	P	Malang,	13-10-1990	Pramubakti
12	Masyhudi	L	Malang,	22-12-1970	Satpam
13	Slamet	L	Malang,	11-12-1973	Cleaning Service
14	Basori	L	Malang,	06-12-1994	Pramubakti
15	Dian Maulidah, S.H.	P	Malang,	19-10-1991	Pramubakti
16	Nanik Erma Nuraini	P	Malang,	19-07-1973	Pramubakti
17	Wahid Suryono, S.H.	L	Pamekasan,	26-02-1990	Pramubakti
18	Anas Makruf Maulidi, S.Kom.	L	Pamekasan,	04-09-1993	Pramubakti
19	Yudhianto Wijaya	L	Malang,	15-06-1981	Satpam
20	Imawati Mahmudah, S.H.	P	Malang,	15-04-1996	Pramubakti




Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. 
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022

Sekretaris


H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

**DATA KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

LAMPIRAN - 12


NO	N A M A	PANGKAT/ GOL. LAMA	PANGKAT/ GOL. BARU	MASA KERJA		TMT	SURAT KEPUTUSAN			KET.
				TAHUN	BULAN		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	
1	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S.	IV/c	IV/d	38	1	1 April 2022	PRESIDEN RI	00012/KEP/AA/15001/22	11 Maret 2022	Reguler
2	Drs. Abd Razak Payapo	IV/c	IV/d	29	1	1 April 2022	PRESIDEN RI	00012/KEP/AA/15001/22	11 Maret 2022	Reguler
3	Drs. Abd. Rouf, M.H.	IV/c	IV/d	28	1	1 April 2022	PRESIDEN RI	00012/KEP/AA/15001/22	11 Maret 2022	Reguler
4	Dra. Hj. Masitah, M.HES.	IV/c	IV/d	28	1	1 April 2022	PRESIDEN RI	00012/KEP/AA/15001/22	11 Maret 2022	Reguler
5	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	IV/c	IV/d	28	1	1 April 2022	PRESIDEN RI	00013/KEP/AA/15001/22	14 Maret 2022	Reguler
6	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H.	III/d	IV/a	20	7	1 Oktober 2022	DIRJEN BADILAG MA RI	2577/DJA/KP.04.1/SK/9/2022	15 September 2022	Reguler
4	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	III/b	III/c	18	3	1 Oktober 2022	DIRJEN BADILAG MA RI	2578/DJA/KP.04.1/SK/9/2022	15 September 2022	Reguler
5	Sutik	II/b	II/c	30	8	1 Oktober 2022	DIRJEN BADILAG MA RI		15 September 2022	Reguler
6	Muhamad Alfian	II/b	II/c	25	0	1 Oktober 2022	DIRJEN BADILAG MA RI	2580/DJA/KP.04.1/SK/9/2022	15 September 2022	Reguler



Mengakui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Sekretaris


H. MAULANA MUSA SUGIL ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

**DATA PEGAWAI YANG KENAIKAN GAJI BERKALA
PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022**

LAMPIRAN - 13

NO	N A M A	PANGKAT / GOL.	TMT KGB	MASA KERJA		SURAT KEPUTUSAN	NOMOR	TANGGAL	GAJI POKOK LAMA	GAJI POKOK BARU
				TAHUN	BULAN					
1	Aimatus Syaidah, S.Ag. M.H.	IV/a	01 Maret 2022	24	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/786/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.281.800	4.416.700
2	Drs. H. Ali Sinwan, M.H.	IV/d	01 Maret 2022	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/784/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	5.321.200	5.488.800
3	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	IV/c	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/793/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.949.400	5.105.300
4	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	IV/a	01 Maret 2022	24	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/801/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.281.800	4.416.700
5	Dra. Istiani Farda	IV/c	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/795/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.949.400	5.105.300
6	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	IV/c	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/794/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.949.400	5.105.300
7	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	IV/d	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/797/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	5.158.700	5.321.200
8	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	IV/d	01 Maret 2022	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/791/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	5.321.200	5.488.800
9	Drs. Maksun, M.Hum	IV/d	01 Maret 2022	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/798/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	5.321.200	5.488.800
10	Hj. Mustiyah, S.H.	III/d	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/798/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.370.900	4.508.600
11	Dra. Hj. Sili Djayadaninggar, M.H.	IV/a	01 Maret 2022	22	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/785/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.151.100	4.281.800
12	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	IV/c	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/799/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.949.400	5.105.300
13	Drs. Abd. Rouf, M.H.	IV/c	01 Maret 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/800/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.949.400	5.105.300
14	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	IV/d	01 Maret 2022	32	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/790/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	5.488.800	5.661.700
15	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	IV/c	01 Maret 2022	26	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/796/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	4.798.300	4.949.400
16	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	IV/d	01 Maret 2022	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/792/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	5.321.200	5.488.800
17	Umar Tajudin, S.H.	III/c	01 Maret 2022	14	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/789/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	3.375.300	3.481.600
18	Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H.	III/d	01 Maret 2022	20	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/788/KP.04.2/1/2022	27 Januari 2022	3.861.000	3.982.600
19	Sutaji, S.H., M.H.	IV/c	01 Juni 2022	30	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/2400/KP.04.2/4/2022	18 April 2022	5.105.300	5.266.100
20	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	III/b	01 Juli 2022	18	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/3063/KP.04.2/5/2022	31 Mei 2022	3.445.500	3.554.000
21	Muhamad Aifan	II/b	01 Oktober 2022	25	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5098/KP.04.2/8/2022	29 Agustus 2022	3.011.300	3.106.100
22	Zainul Fanani, S.H., M.H.	III/b	01 Oktober 2022	18	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/5097/KP.04.2/8/2022	29 Agustus 2022	3.445.500	3.554.000
23	Djazlatur Rachmach, S.H., M.H.	IV/a	01 Desember 2022	28	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/7321/KP.04.2/10/2022	26 Oktober 2022	4.555.800	4.699.300
24	Khusnul Aini, S.H., M.H.	III/c	01 Desember 2022	10	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/7322/KP.04.2/10/2022	26 Oktober 2022	3.172.300	3.272.200
25	Hanum Shirota Nida S.Kom.	III/a	1 Desember 2022	2	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/7323/KP.04.2/10/2022	26 Oktober 2022	2.579.400	2.660.700
26	Venny Alvonita A.Md.	II/c	1 Desember 2022	5	0	Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang	W13-A35/7324/KP.04.2/10/2022	26 Oktober 2022	2.301.800	2.374.300

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711022.199605.1.001

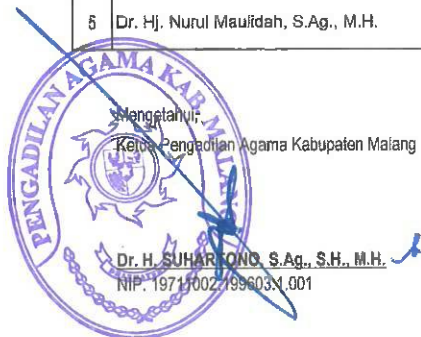
Kepanjen, 30 Desember 2022
Sekretaris

H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG MUTASI MASUK PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 14

NO.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	Dra. Hj. Masitah, M.HES.	19680214.199403.2.004	IV/d	Pengadilan Agama Bangil Kelas IB	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Hakim Utama Muda	Hakim Utama Muda	36/KMA/SK/II/2022	24 Januari 2022	10 Februari 2022	
2	Maulana Musa Sugl Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	IV/b	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Kabag. Perencanaan Dan Kepegawaian	Sekretaris	203/Sek/Kp.I/SK/II/2022	09 Februari 2022	10 Maret 2022	
3	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	III/d	Pengadilan Agama Pasuruan Kelas IB	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	944/SEK/Kp.I/SK/VII/2022	22 Juli 2022	01 Agustus 2022	
4	Hamsia Miton, S.E.	19811230.201101.2.004	III/c	Pengadilan Agama Malang Kelas IA	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Bendaharawan	Jurusita	1462/DJA/KP.04.6/SK/7/2022	18 Juli 2022	01 Agustus 2022	
5	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	19740807.199803.2.001	IV/c	Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas IA	Ketua/Hakim Madya Utama	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	248/KMA/SK/VIII/2022	23 Agustus 2022	6 September 2022	



Kepanjen, 30 Desember 2022

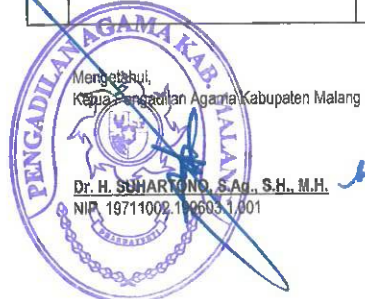
Sekretaris

[Signature]
H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
 NIP. 19721021.199303.1.002


**DAFTAR PEGAWAI YANG PINDAH / MUTASI KELUAR TEMPAT BEKERJA
PADA PENGADILAN AGAMA MALANG TAHUN 2022**

LAMPIRAN - 15

No.	NAMA	NIP	GOL/ RUANG	TEMPAT TUGAS		JABATAN		SURAT KEPUTUSAN			KET.
				LAMA	BARU	LAMA	BARU	NOMOR SURAT	TANGGAL	TMT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.	19680303.199703.1.001	IV/c	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A	Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A	36/KMA/SK/I/2022	24 Januari 2022	16 Februari 2022	
2	H. Khoirudin, S.H.	19720928.199203.1.002	IV/b	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Sekretaris Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	203/SEK/Kp.I/SK/II/2022	09 Februari 2022	09 Maret 2022	
3	Mohammad Faried Dzirkullah, S.H.,M.H.	19751025.200212.1.001	IV/a	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A	Kasubbag PTIP Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A	203/SEK/Kp.I/SK/II/2022	09 Februari 2022	08 Maret 2022	
4	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	19640401.199203.1.004	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	248/KMA/SK/VIII/2022	23 Agustus 2022	06 September 2022	
5	Dra. Hj. Masitah, M.HES.	19680214.199403.2.004	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	01 Desember 2022	
6	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	19640602.199203.1.002	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	01 Desember 2022	
7	Dra. Burnalis, M.A	19620706.198203.2.002	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	01 Desember 2022	
8	Drs. Makmur, M.H.	19621231.199103.1.046	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	
9	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	19621231.199103.1.046	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	
10	Drs. Abd Razak Payapo	19631012.199303.1.005	IV/d	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	
11	Hamsia Mitan, S.E.	19811230.201101.2.004	III/c	Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	Juru sita Pengadilan Agama Kab. Malang Kelas 1A	Juru sita Pengadilan Agama Malang Kelas 1A	2857/DJA/KP.04.6/SK/11/2022	30 November 2022	06 Desember 2022	



Kepanjen, 30 Desember 2022
Sekretaris


H. MAULANA MUSA SUGILAM, S.H.
NIP. 19721021.199203.1.002

DATA CUTI PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 16

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	LAMA CUTI	MULAI s/d SELESAI	JENIS CUTI	KETERANGAN
1	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	19601231.199403.1.027	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	05 s/d 07 Januari 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
2	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	07 Januari 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
3	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	19650209.199303.1.002	IV/b	Panitera	2 hari	12 s/d 13 Januari 2022	Cuti Sakit	Sakit
4	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	III/b	Panitera Pengganti	2 hari	06 s/d 07 Januari 2022	Cuti Sakit	Sakit
5	Rizky Ananda Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	III/a	Anais Perkara Peradilan	1 hari	27 Januari 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
6	Dr. H. Suhartono S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	IV/c	Ketua	2 hari	03 s/d 04 Februari 2022	Cuti Sakit	Sakit
7	Dra. Hj. Rasmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	07 s/d 09 Februari 2022	Cuti Sakit	Sakit
8	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	III/b	Panitera Pengganti	3 hari	07 s/d 09 Februari 2022	Cuti Sakit	Sakit
9	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	16 Februari 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
10	Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	III/d	Panitera Pengganti	3 hari	16 s/d 18 Februari 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
11	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	III/d	Panitera Pengganti	6 hari	23 Februari s/d 04 Maret 2022	Cuti Sakit	Sakit Covid19
12	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	04 Maret 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
13	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	III/c	Panitera Muda Permohonan	4 hari	01 s/d 07 Maret 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
14	Sutik	19650518.201405.1.001	II/c	Jurusita Pengganti	2 hari	07 s/d 08 Maret 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
15	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	IV/c	Hakim Madya Utama	1 hari	11 Maret 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
16	Maulana Musa Sugi Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	IV/b	Sekretaris	1 hari	18 Maret 2022	Cuti Sakit	Sakit
17	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	01 April 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
18	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	14 April 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
19	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	IV/c	Hakim Madya Utama	2 hari	21 s/d 22 April 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
20	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	II/c	Pengelola Perkara	1 hari	27 April 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
21	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	III/c	Panitera Pengganti	9 hari	9 s/d 20 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
22	H. Mubahl, S.H.	19570815.197903.1.001	IV/d	Hakim Utama Muda	9 hari	20 Mei s/d 03 Juni 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
23	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	III/c	Panitera Pengganti	5 hari	17 s/d 20 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
24	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	19571128.198401.2.001	IV/d	Hakim Utama Muda	2 hari	30 s/d 31 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
25	Mochammad Yoesuf S.H.	19900503.202203.1.003	III/a	CPNS Analis Perkara Peradilan	2 hari	23 s/d 24 Mei 2022	Cuti Alasan Penting	Istri melahirkan
26	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	III/d	Kasubbag. Umum dan Keuangan	1 hari	11 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
27	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	19640401.199203.1.004	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	27 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
28	Drs. Maksum, M.Hum	19640316.199203.1.002	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	27 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
29	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	III/a	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1 hari	27 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
30	Homsiyah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	27 Mei 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
31	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	06 s/d 08 Juni 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
32	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	II/c	CPNS Pengelola Perkara	1 hari	10 Juni 2022	Cuti Sakit	Sakit
33	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	III/a	CPNS Analis Perkara Peradilan	2 hari	13 s/d 14 Juni 2022	Cuti Sakit	Sakit
34	H. Suaiddi Mashfuh, S.Ag., M.H.E.S.	19570705.198203.1.007	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	17 Juni 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
35	Aimatus Syaidah, S. Ag., M.H.	19720404.199803.2.005	IV/a	Panitera Pengganti	1 hari	21 Juni 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
36	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	II/c	CPNS Pengelola Perkara	1 hari	29 Juni 2022	Cuti Sakit	Sakit
37	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	III/c	Panitera Pengganti	1 hari	04 Juli 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
38	Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H.	19710101.199703.1.012	III/d	Panitera Muda Hukum	5 hari	11 s/d 15 Juli 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
39	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	II/b	Jurusita Pengganti	2 hari	08 s/d 11 Juli 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
40	Drs. Makmur, M.H.	19621231.199103.1.046	IV/d	Hakim Utama Muda	3 hari	15 s/d 18 Juli 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
41	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	IV/a	Panitera Pengganti	3 hari	20 s/d 22 Juli 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
42	Drs. H. Wamita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	IV/d	Hakim Utama Muda	1 hari	05 Agustus 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
43	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	III/c	Panitera Muda Gugatan	1 hari	05 Agustus 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
44	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	III/d	Kasubbag PTIP	1 hari	18 Agustus 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
45	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	III/c	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	1 hari	22 Agustus 2022	Cuti Sakit	Sakit
46	Hanum Shirotu Nida S. Kom.	19940918.202012.2.007	III/a	Pranata Komputer	2 hari	16 s/d 19 September 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga

47	Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md.	19940729.202203.1.011	II/c	CPNS Pengelola BMN	6 hari	07 s/d 14 Oktober 2022	Cuti Alasan Penting	Menikah
48	Dhimas Adityarahman P., S.Ak	19950714.202203.1.004	III/a	CPNS APEP	2 hari	05 s/d 06 Oktober 2022	Cuti Sakit	Sakit
49	Hamsia Miton, S.E.	19811230.201101.2.004	III/c	Jurusita	1 hari	20 Oktober 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
50	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	III/d	Panitera Pengganti	7 hari	09 s/d 17 November 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga
51	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	III/b	Panitera Pengganti	1 hari	22 Desember 2022	Cuti Tahunan	Keperluan Keluarga

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Sekretaris


H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG PROMOSI PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 17

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	KET
				Dari	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Mohammad Faried Dzirkullah, S.H.,M.H.	19751025.200212.1.001	IV/a	Sekretaris MA RI	203/SEK/Kp.I/SK/II/2022	09 Februari 2022	08 Maret 2022	Sekretaris Pengadilan Agama Trenggalek
2	Drs. H. Moh. Syafruddin, M.Hum.	19640401.199203.1.004	IV/d	Ketua MA RI	248/KMA/SK/VIII/2022	23 Agustus 2022	06 September 2022	Hakim Tinggi Maluku Utara
3	Drs. H. Ali Sirwan, M.H.	19640602.199203.1.002	IV/d	Ketua MA RI	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	01 Desember 2022	Hakim Tinggi Kalimantan Utara
4	Dra. Burnalis, M.A	19620706.198203.2.002	IV/d	Ketua MA RI	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	Hakim Tinggi Kepulauan Riau
5	Drs. Makmur, M.H.	19621231.199103.1.046	IV/d	Ketua MA RI	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	Hakim Tinggi Papua Barat
6	Drs. H. Abdul Kholik, M.H.	19620612.199103.1.008	IV/d	Ketua MA RI	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	Hakim Tinggi Papua Barat
7	Drs. Abd Razak Payapo	19631012.199303.1.005	IV/d	Ketua MA RI	339/KMA/SK/XI/2022	28 November 2022	02 Desember 2022	Hakim Tinggi Papua Barat

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022
Sekretaris

H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

DAFTAR PEGAWAI YANG TELAH PENSIUN PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 18

No	Nama	NIP	GOL RUANG	Surat Keputusan			TMT	Masa Kerja Golongan		KET
				Dari	Nomor	Tanggal		Tahun	Bulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S.	19570705.198203.1.007	IV/e	Sekretaris MA RI	00373/13001/AZ/04/22	13-Apr-22	1 Agustus 2022	38	4	
2	H. Mubahi, S.H.	19570815.197903.1.001	IV/e	Sekretaris MA RI	00377/13001/AZ/04/22	13-Apr-22	01-Sep-22	43	6	
3	Dra. Hj. Azizah Ulfah, M.H.	19571128.198401.2.001	IV/e	Sekretaris MA RI	00502/13001/AZ/06/22	13 Juni 2022	1 Desember 2022	36	10	

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19741002.199603.1.001

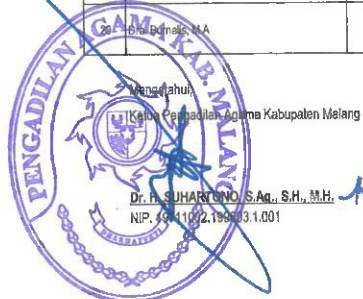
Kepanjen, 30 Desember 2022
Sekretaris

H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

DATA PELATIHAN / DIKLAT UNTUK TENAGA TEKNIS YUDISIAL. PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 19

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN / DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua/Hakim Madya Utama	Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan Kepemimpinan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	26 s.d. 28 Januari 2022	Singhasari Resort Jl. Ir. Soekarno No. 120 Baji Kota Batu Jawa Timur.
		Ketua/Hakim Madya Utama	Pengembangan Kurikulum dan Modul	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	03 s.d. 07 Juli 2022	Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta
		Ketua/Hakim Madya Utama	Pelatihan Online Audit For Non-Auditor Angkatan 1 dari Tempat Tugas Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	26 s.d. 30 September	Tempat tugas masing-masing
2	Dra. H. Badawi Asyhan, S.H., M.H.	Panitera	Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan Kepemimpinan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	26 s.d. 28 Januari 2022	Singhasari Resort Jl. Ir. Soekarno No. 120 Baji Kota Batu Jawa Timur.
		Panitera	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	22 s.d. 24 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
3	Djaziator Rachmadi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	15 s.d. 17 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
4	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.I	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	15 s.d. 17 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
5	Dr. Bayu Endragupta, S. Kom., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.I	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	15 s.d. 17 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
		Panitera Pengganti	Bimbingan Teknis Bidang Manajemen Kepaniteraan dan Sisa Eksekusi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	23 s.d. 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A Yani Utara Riverside Blok C-1 Malang.
6	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.I	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	15 s.d. 17 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
7	Amelus Syalish, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	15 s.d. 17 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
8	H. Masnur Ali, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	22 s.d. 24 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
9	Fusad Hamid Adjuhi, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	22 s.d. 24 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
10	Dra. Hj. Sib Djayadiningsih, M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	22 s.d. 24 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
11	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	29 s.d. 31 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
		Panitera Muda Gugatan	Bimbingan Teknis Bidang Manajemen Kepaniteraan dan Sisa Eksekusi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	23 s.d. 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A Yani Utara Riverside Blok C-1 Malang.
12	Hadjah Haseawuddin, S.H., M.H.	Panitera Muda Permohonan	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.II	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	29 s.d. 31 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
13	Hj. Mustiyah, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.III	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	29 s.d. 31 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
14	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.III	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	29 s.d. 31 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
15	Homsyah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel.III	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	29 s.d. 31 Maret 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
16	Widodo Supriyanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel. V	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	12 s.d. 14 April 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
17	Wiwit Sulistyawati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel. V	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	12 s.d. 14 April 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
18	Zainul Fanani, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel. V	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	12 s.d. 14 April 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
19	Unar Tajudin, S.H.	Panitera Pengganti	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (Empat) Peradilan Seluruh Indonesia Gel. V	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kundi Mahkamah Agung RI	12 s.d. 14 April 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
20	Bela Bismah, M.A.	Hakim Utama Muda	Peserta Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawan bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Agama seluruh Indonesia.	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI	05 s.d. 17 September 2022	Tempat tugas masing-masing dan di Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Bogor



Kepanjen, 30 Desember 2022

Sekretaris

H. MAULANA MUSA SUDALAM, S.H.
NIP. 197210211990031.002

DATA TENAGA TEKNIS YUDISIAL PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 20

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL		KETERANGAN
1	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.	19711002.199603.1.001	Ketua / Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
2	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.	19740807.199803.2.001	Wakil Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
3	Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.	19600605.198703.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
4	Drs. Maksum, M.Hum	19640316.199203.1.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
5	Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum	19670105.199203.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
6	Dra. Hj. Masrifah, M.H.	19650315.199303.2.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
7	Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.	19650715.199403.1.003	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Madya	IV/c	
8	Dra. Hj. Enik Faridaturrohman, M.H.	19700407.199403.2.002	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
9	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	19601231.199403.1.027	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
10	Drs. Abd. Rouf, M.H.	19660925.199403.1.005	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
11	Dra. Istiani Farda	19690414.199403.2.004	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
12	Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.	19680301.199403.2.005	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
13	Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.	19641007.199003.2.001	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
14	Drs. H. Warnita Anwar, M.H.E.S	19630803.199103.1.003	Hakim/Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	
15	Sutaji, S.H., M.H.	19680809.199203.1.003	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	
16	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.	19650209.199303.1.002	Panitera	Pembina Tk. I	IV/b	
18	Widodo Suparjianto, S.H.I., M.H.	19710101.199703.1.012	Panitera Muda Hukum	Pembina	IV/a	
19	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	19690811.201405.2.001	Panitera Muda Permohonan	Penata	III/c	
20	Idha Nur Habibah, S.H., M.H.	19850831.200604.2.001	Panitera Muda Gugatan	Penata	III/c	
21	Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.	19690808.198912.2.001	Hakim/Hakim Madya Utama	Pembina	IV/a	
22	Mastur Ali, S.H.	19680808.199403.1.006	Panitera	Penata Tk. I	III/d	
23	Homsiyah, S.H., M.H.	19660428.199012.2.001	Panitera Muda Hukum	Pembina	IV/a	
24	Aimatius Syaidah, S.Ag. M.H.	19720404.199803.2.005	Panitera Muda Permohonan	Pembina	IV/a	
25	Dra. Hj. Siti Djayadaninggar, M.H.	19661027.200003.2.002	Panitera Muda Gugatan	Pembina	IV/a	
26	Hj. Mustiyah, S.H.	19680708.198903.2.001	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	

27	Fuad Hamid Aldjufri, S.H., M.H.	19650526.199803.1.001	Panitera Pengganti	Pembina	IV/a	
28	Umar Tajudin, S.H.	19781114.200604.1.011	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
29	Ahmad Rosyidi, S.H., M.H.	19790320.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	
30	Wiwin Sulistiyawati, S.H., M.H.	19710501.201405.2.001	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
31	Zainul Fanani, S.H., M.H.	19741219.201405.1.001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tk. I	III/b	Merangkap Bendahara Penerimaan
32	Hera Nurdiana, S.H., M.H.	19781009.201408.2.002	Panitera Pengganti	Penata	III/c	Merangkap Bendahara Pengeluaran
33	Ahmad Fathoni Arfan, S. Kom., S.H., M.H.	19870926.201101.1.011	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
34	Dr. Bayu Endragupta, S. Kom., S.H., M.H.	19841107.200904.1.005	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
35	Yussi Candra Rudiansyah, S.H., M.H.	19660119.198703.1.001	Jurusita	Penata Tk. I	III/d	
36	Muhamad Alfian	19690904.201405.1.002	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/c	
37	Sutik	19650518.201405.1.001	Jurusita Pengganti	Pengatur	II/c	

Kepanjen, 30 Desember 2022

Sekretaris



H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.

NIP. 19721021.199303.1.002

DATA PELATIHAN/DIKLAT UNTUK TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 21

NO.	NAMA PEGAWAI	JABATAN	PELATIHAN/DIKLAT	PENYELENGGARA	TANGGAL	TEMPAT
1	H. Khoirudin, S.H.	Sekretaris	Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan Kepemimpinan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	26 s/d 28 Januari 2022	Singhasari Resort Jl. Ir. Soekarno No. 120 Beji Kota Batu Jawa Timur.
2	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Website dan Media Sosial di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	23 s/d 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A.Yani Utara Riverside Blok C-1 Malang.
3	Venny Alvionita, A.Md.	Pengelola Perkara	Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Website dan Media Sosial di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	23 s/d 25 Mei 2022	Harris Conventions Malang, Jl. A.Yani Utara Riverside Blok C-1 Malang.
4	Hanum Shirota Nida, S.Kom	CPNS Pranata Komputer	Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Golongan III Angkatan XIII Tahun 2022.	Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang Kumdl Mahkamah Agung RI	31 Januari s/d 13 Mei 2022	Satuan Kerja Masing-Masing
5	Mochammad Yoesuf, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	08 Agustus s.d. 12 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan STIESIA Surabaya
6	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	CPNS Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2023	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	08 Agustus s.d. 12 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan STIESIA Surabaya
7	Sindy Siska Silvana, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2024	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	08 Agustus s.d. 12 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan STIESIA Surabaya
8	Zidna Mazidah, S.H.	CPNS Analis Perkara Peradilan	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2025	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	08 Agustus s.d. 12 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan STIESIA Surabaya
9	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	CPNS Pengelola Perkara	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2026	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	08 Agustus s.d. 05 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
10	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	CPNS Pengelola Perkara	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2027	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	08 Agustus s.d. 05 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
11	Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md.	CPNS Pengelola Barang Milik Negara	Latsar CPNS Gelombang I Gol. III Angkatan I s.d. V dan Gol. II Angkatan I s.d. IV Secara Blended Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya Tahun 2028	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya	8 Agustus s.d. 05 November 2022	Tempat tugas masing-masing dan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
12	Maulana Musa Sugi Alam, S.H.	Sekretaris	Peserta Bimbingan Teknis Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	28 s.d. 30 November 2022	Hotel Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Sidoarjo, Jawa Timur
13	Buyung Tumanggor, S. Kom.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	Peserta Bimbingan Teknis Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	28 s.d. 30 November 2022	Hotel Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Sidoarjo, Jawa Timur
14	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	Analis Kepegawain Ahli Pertama	Peserta Bimbingan Teknis Manajemen Kesekretariatan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2022	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	28 s.d. 30 November 2022	Hotel Aston Sidoarjo City Hotel & Conference Center, Sidoarjo, Jawa Timur

Kepanjen, 30 Desember 2022

Sekretaris

H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.

NIP. 19721021.199303.1.002

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.

NIP. 19711002.198003.1.001

DATA TENAGA NON TEKNIS YUDISIAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

LAMPIRAN - 22

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL		KETERANGAN
1	Maulana Musa Sugi Alam, S.H.	19721021.199303.1.002	Sekretaris	Pembina Tk. I	IV/b	
2	Buyung Tumanggor, S.Kom.	19750404.200912.1.002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Tk.I	III/d	
3	Junaidi Syampurno, S.H.	19800718.201101.1.006	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata Tk.I	III/d	
4	Khusnul Aini, S.H., M.H.	19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Penata	III/c	
5	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P.	19870324.201903.2.005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	
6	Rizky Ananda Putri, S.H.	19940421.201903.2.012	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
7	Hanum Shirotu Nida S.Kom.	19940918.202012.2.007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	
8	Venny Alvionita A.Md.	19961223.202012.2.008	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	
9	Mochammad Yoesuf, S.H.	19900503.202203.1.003	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
10	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak	19950714.202203.1.004	CPNS Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penata Muda	III/a	
11	Sindy Siska Silvana, S.H.	19960913.202203.2.016	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
12	Zidna Mazidah, S.H.	19990211.202203.2.006	CPNS Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
13	Desy Ayu Rachmadany, A.Md	19940213.202203.2.016	CPNS Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	
14	Yoni Bayu Suprayogo, A.Md	19940610.202203.1.001	CPNS Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	
15	Muhammad Arif Raihan Lubis, A.Md.	19940729.202203.1.011	CPNS Pengelola Barang Milik Negara	Pengatur	II/c	

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 30 Desember 2022

Sekretaris


H. MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

**RINCIAN BELANJA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAMPIRAN 24

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 11.709.386.000	Rp 11.624.256.695	Rp 85.129.305	Terealisasi 99,27%

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2022

Sekretaris

MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

**REKAPITULASI BELANJA BARANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAMPIRAN 25

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 2.792.794.000	Rp 2.791.444.161	Rp 1.349.839	Terealisasi 99,95%

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2022
Sekretaris

MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

**REKAPITULASI BELANJA MODAL PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

LAMPIRAN 26

NO	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Pengadilan Agama Kabupaten Malang (604730)	Rp 425.400.000	Rp 424.655.000	Rp 745.000	Terealisasi 99,82%

Mengetahui :

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. ✕
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2022

Sekretaris

MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP 19721021.199303.1.002

**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DIPA 604730 TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

LAMPIRAN 27

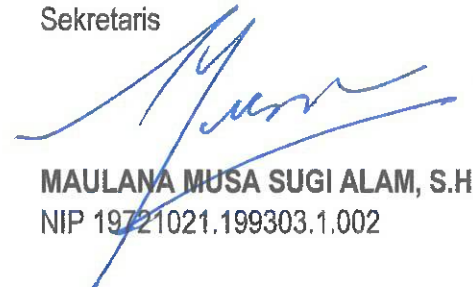
NO	BULAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	KETERANGAN
1	Januari	Rp -	Rp -	
2	Pebruari	Rp -	Rp -	
3	Maret	Rp -	Rp -	
4	April	Rp -	Rp -	
5	Mei	Rp -	Rp -	
6	Juni	Rp -	Rp -	
7	Juli	Rp -	Rp -	
8	Agustus	Rp -	Rp -	
9	September	Rp -	Rp -	
10	Oktober	Rp -	Rp -	
11	Nopember	Rp -	Rp -	
12	Desember	Rp -	Rp -	
		Rp -	Rp -	NIHIL

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2022
Sekretaris


MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.
NIP 19721021.199303.1.002

**DATA KENDARAAN DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

Lampiran 30


No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Pemegang SIP	Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
I	Kendaraan Roda 4						
1	Sedan	1999	V			Kasubag Umum dan Keuangan	Timor
2	Station Wagon	2015	V			Ketua	Kijang Innova
3	Station Wagon	2009	V			Sekretaris	Kijang Innova
4	Station Wagon	2011	V			Panitera	Avanza
II	Kendaraan Roda 2						
1	Binter	1999			V		
2	Honda grand	1999			V		
3	Win	1999			V		
4	Shogun	1999			V		
5	Supra X	2006	V			Wakil Ketua	
6	Supra X	2006	V			Panitera	
7	Mega Pro	2008	V			Kasubag PTIP	
8	Mega Pro	2008	V			Kasubag Umum dan Keuangan	
9	Mega Pro	2008	V			Panitera Muda Hukum	

Mengetahui,
Sekretaris



Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
NIP 19721021 199303 1 002

Kepanjen, 31 Desember 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan



Buyung Tumanggor, S.Kom.
NIP 19750404 200912 1 002

**DATA RUMAH DINAS
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

Lampiran 30

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					NIHIL
1	Ketua					NIHIL
2	Wakil Ketua					NIHIL
3	Hakim					NIHIL
4	Panitera					NIHIL
5	Sekretaris					NIHIL

Mengetahui,
Sekretaris



Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
NIP 19721021 199303 1 002

Kepanjen, 31 Desember 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan



Buyung Tumanggor, S.Kom.
NIP 19750404 200912 1 002

**DATA SARANA PRASARANA
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2022**

Lampiran 30

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Ruangan		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sekretaris	1	
5	Ruang Kepaniteraan	1	
6	Ruang Kesekretariatan	1	
7	Ruang Panitera Pengganti / Jurusita	1	
8	Ruang Hakim	1	
9	Ruang Rapat Pimpinan / Media Center	1	
10	Ruang Sidang Utama	1	
11	Ruang Sidang I	1	
12	Ruang Sidang II	1	
13	Ruang Sidang III	1	
14	Ruang PTSP	1	
15	Ruang Perpustakaan	1	
16	Ruang Arsip	1	
17	Ruang IT	1	
18	Ruang Tunggu Dalam	1	
19	Ruang Tunggu Luar	1	
20	Ruang Lobby LT.1	1	
21	Ruang Tamu Ketua	1	
22	Ruang Mediasi	1	
23	Ruang Posbakum	1	

24	Ruang Laktasi	1	
25	Ruang Humas	1	
26	Ruang Advokat	1	
27	Ruang Kesehatan	1	
28	Ruang Pojok Konseling	1	
29	Gedung Arsip	1	2 Lantai
II	Fasilitas Disabilitas		
1	ATR (Auto Text Recording)		
2	Sensor Suara Penunjuk Ruangan		
3	Kartu Prioritas		
4	Deteksi Dini Penyandang Disabilitas		
5	Brosur Informasi Berperkara Braille		
6	Papan Penunjuk Arah Braille		
7	Alat Bantu Disabilitas		
8	Brosur Audio Persyaratan Disabilitas		
9	Jalur Khusus Disabilitas		
10	Area Parkir Disabilitas		
11	Halte Disabilitas		
12	Toilet Disabilitas		
13	Ruang Baca Disabilitas		
14	Meja Layanan Khusus Disabilitas		
15	Ruang Gugatan Mandiri Disabilitas		
16	Kursi Tunggu Prioritas		
17	Musholla yang Aksesibel		
	Fasilitas Perkantoran		
III	Komputer		
1	P.C Unit	63	
2	Laptop	27	
3	Printer	43	

4	Scanner	1	
5	Film Projector	2	
6	AC	30	
7	Faximile	1	
8	Genset	2	
9	Televisi	6	

Mengetahui,
Sekretaris



Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
NIP 19721021 199303 1 002

Kepanjen, 31 Desember 2022
Kasubbag Umum dan Keuangan

Buyung Tumanggor, S.Kom.
NIP 19750404 200912 1 002


JUMLAH SURAT MASUK BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

LAMPIRAN 31


NO	KODE SURAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	KET	JUMLAH
1	OT	2	2	7	1	12	3	4	4	4	2	4	1		46
2	HM	0	0	1	12	1	11	10	21	1	21	3	4		85
3	KP	2	2	2	4	2	1	3	0	1	2	0	0		19
4	KU	43	4	26	14	10	15	18	12	13	18	22	11		206
5	KS	18	7	6	16	18	15	9	10	24	13	4	6		146
6	PL	235	338	240	401	310	8	8	6	6	5	3	7		1567
7	HK	16	1	20	70	97	97	239	110	325	298	110	265		1648
8	PP	2	0	0	2	0	3	6	4	3	2	4	4		30
9	PB	43	54	0	50	20	52	32	34	59	69	70	25		508
10	PS	0	0	1	1	0	2	1	0	0	1	2	2		10
11	SK	0	0	1	1	0	0	2	2	1	2	2	2		13
	JUMLAH	361	408	304	572	470	207	332	203	437	433	224	327		4278



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H. 
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2022
Sekretaris


Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002

JUMLAH SURAT KELUAR BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

LAMPIRAN 32

NO	KODE SURAT	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AUGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	KET	JUMLAH
1	OT	3	3	1	2	0	3	32	8	7	9	29	8		105
2	HM	0	2	15	0	0	19	32	23	50	41	17	42		241
3	KP	0	52	32	10	11	31	21	15	11	32	22	105		342
4	KU	2	0	35	9	0	31	198	157	120	22	178	69		821
5	KS	2	2	3	0	4	17	17	17	16	30	27	12		147
6	PL	921	321	388	1200	202	260	9	4	2	2	6	1		3316
7	HK	97	170	231	560	72	571	66	628	87	326	105	98		3011
8	PP	20	9	9	2	1	2	2	12	16	4	14	22		113
9	PB	20	36	5	2	3	12	5	10	2	4	9	10		118
10	PS	26	30	3	0	0	3	9	8	3	12	3	14		111
	JUMLAH	1091	625	722	1785	293	949	391	882	314	482	410	381		8325



Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19711002.199603.1.001

Kepanjen, 31 Desember 2022
Sekretaris

Maulana Musa Sugi Alam, S.H.
NIP. 19721021.199303.1.002